



**PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP MENURUT
PSAK NO. 16 DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET
TETAP PADA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH
SUMATERA UTARA AREA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

COSINUS MELVIN SITORUS PANE
NPM: 1625100642

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : COSINUS MELVIN SITORUS PANE
NPM : 1625100642
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP
MENURUT PSAK NO. 16 DAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI ASET TETAP PADA PT PLN (Persero)
WILAYAH SUMATERA UTARA AREA MEDAN

MEDAN, AGUSTUS 2020

KETUA PROGRAM STUDI


(Junawan, S.E., M.Si)

PEMBIMBING I


(Drs. Nadjib, Ak., MM)

DEKAN


(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

PEMBIMBING II


(Yunita Sari Rioni, S.E., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : COSINUS MELVIN SITORUS PANE
NPM : 1625100642
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP
MENURUT PSAK NO. 16 DAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI ASET TETAP PADA PT PLN (Persero)
WILAYAH SUMATERA UTARA AREA MEDAN

MEDAN, AGUSTUS 2020

KETUA

(Junawan, S.E., M.Si)

ANGGOTA I

(Drs. Nadjib, Ak., MM)

ANGGOTA II

(Yunita Sari Rioni, S.E., M.Si)

ANGGOTA III

(Suroso, S.E., M.Si., Ak)

ANGGOTA IV

(Hernawaty, S.E., MM)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Cosinus Melvin Sitorus Pane
Tempat/tanggal lahir : Lumban Sihole, 02 Oktober 1985
NPM : 1625100642
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jl. Nusa Indah I No. 33 B3 Medan Selayang

Dengan ini menyatakan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi.

Sehubungan dengan hal ini, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai di masa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Februari 2020



Cosinus Melvin Sitorus Pane

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Cosinus Melvin Sitorus Pane

NPM : 1625100642

Fakultas : Sosial Sains

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Penerapan Akuntansi Menurut PSAK No. 16 dan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan

Dengan ini menyatakan bahwa;

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (Plagiat).
2. Memberi izin hak bebas royalti non-eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media / formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Februari 2020



6000
RUPIAH

Cosinus Melvin Sitorus Pane



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : COSINUS MELVIN SITORUS PANE
 Tgl. Lahir : LUMBAN SIHOLE / 02 Oktober 1985
 NIM / NPM : 1625100642
 Jurusan Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Bisnis
 Kredit yang telah dicapai : 125 SKS, IPK 3.00
 yang ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul Skripsi	Persetujuan
PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP MENURUT PSAK NO. 16 DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA PT PLN (Persero) WILAYAH SUMATERA UTARA AREA MEDAN	<input checked="" type="checkbox"/>
ANALISA PENERAPAN PSAK NO. 13 "PROPERTI INVESTASI" STUDI KASUS PT PLN (Persero) WILAYAH SUMATERA UTARA	<input type="checkbox"/>
ANALISA LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN RASIO AKTIVITAS DAN PROFITABILITAS PADA PT PLN (Persero) WILAYAH SUMATERA UTARA	<input type="checkbox"/>

yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 10 Februari 2018
 Pemohon,

 (COSINUS MELVIN SITORUS PANE)

Nomor :
 Tanggal :

Disahkan oleh :
 Dekan

(Dr. Surya Nita, S.P., M.Hum.)

Tanggal : 10 Februari 2018

Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Akuntansi

(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal :

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

(Drs. Nadya Akbar, S.E.)

Tanggal : 08/02/2018

Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II :

(Drs. P. Jetti Rani, SE, M.Si, Ak.)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA SIKHA
 Medan, 19 FEBRUARI 2020
 THAEMILI HAKIM
 Dosen Prodi S1 Akuntansi

FM-BPAA-2012-041

Medan, 22 November 2019
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan

Di Tempat
 Dengan persyaranan
 dapat di proses
 Medan, 21/02/2020
 An. *Arif*
 FEGUHA WAHYONO, SE., M.M.

Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama : COSINUS MELVIN SITORUS PANE
 Tempat/Tgl. Lahir : Lumban Sihole / 02 Oktober 1985
 Nama Orang Tua : PILIAN SITORUS
 NIM : 1625100642
 Jurusan : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 081375270272
 Alamat : Jl. Nusa Indah 3 Medan Selayang

Yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Penerapan Akuntansi Aset Tetap Menurut K. No. 16 dan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan, Selanjutnya saya menyatakan

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terselip surat keterangan bebas laboratorium
- Terselip pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terselip foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terselip pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilid diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terselip surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berlis di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	300,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000
UK-T.50%	Rp.	4,200,000

Periode Wisuda Ke : **64**
 Ukuran Toga : **XL**
21/02-2020



Hormat saya
(Signature)
 COSINUS MELVIN SITORUS PANE
 1625100642

- Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (ash) - Mhs.ybs.

1292 / PEP / Bp / 2019
 22 NOV 2019
 Nanda Khairidah, S.Ip

25/11-19
(Signature)

Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report

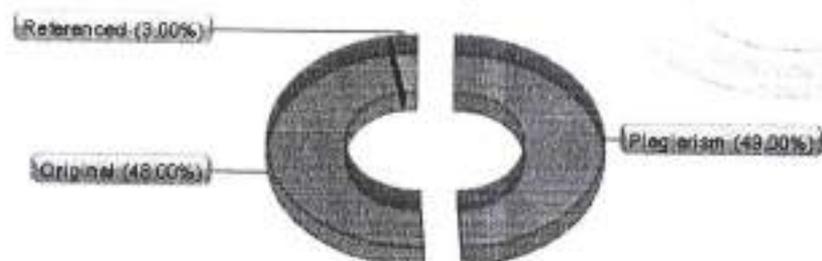
Analyzed document: 01/21/20 07:59:21

"COSINUS MELVIN SITORUS PANE_1625100642_AKUNTANSI.doc"

Check Type: Internet - via Google and Bing

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- 0 wrds: 9800 <https://id.123dok.com/document/4yrod6jy-perencanaan-dan-pengawasan-beban-operasi...>
- 0 wrds: 8105 http://lib.unnes.ac.id/11285/1/9063_TA.pdf
- 0 wrds: 3781 <https://docplayer.info/46823482-Perunga-g-ivana-analisis-sistem-penghentian-wil...>

Other Sources:]

Processed resources details:

183 - Ok / 15 - Failed

Other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:



not detected]

GoogleBooks Detected!

[not detected]

[not detected]

Active References (Urls Extracted from the Document):

Excluded Urls:

Included Urls:



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas Pembangunan Panca Budi
 SOSIAL SAINS
 Drs. NADJIB AK MM
 YUNITA SARI KLOWI SE, MSI AK
 COSINUS MELVIN SITORUS PANE
 Akuntansi
 1625100642
 PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP MENURUT PSAK NO. 16 DAN
 KEAJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA PT. PLN (PERSERO)
 WILAYAH SUMATERA UTARA AREA MEDAN

KATEGORI	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
	<p>Substansi 16- Kepanjangan dari BASTP? 12- Perbaiki kalimat? 17- Tambahkan kalimat? 10- Mana penjelasannya? Cek kembali penomoran dari daftar isi sesuai dengan ketentuan. 9/12/2018</p>		

Asa Aisy proposal

9/10/2018
 12

Medan, 09 November 2018

Diketahui/Ditetujui oleh :
 Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi

Fakultas : SOSIAL SAINS

Pembimbing I : Drs. NADJIB Ak, MM

Pembimbing II : YUNITA SARI HONI, SE, MSi, AK

Mahasiswa : COSINUS MELVIN SITORUS PANE

Program Studi : Akuntansi

NPM/Pokok Mahasiswa : 1625100642

Jurusan Pendidikan : S-1

Tugas Akhir/Skripsi : PENERAPAN AKUNTANSI MENURUT PSAK NO.16 DAN
 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA PT. PLW (PERSERO)
 WILAYAH SUMATERA UTARA AREA MEDAN

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
1/18	Perhatikan spasi penulisan Daftar Pustaka dibunt berdasarkan abjad nama color & tidak warna	Ysr	
2/18	Perbaiki daftar Pustaka Perbaiki color	Ysr	
4/18	ACC seminar PROPOSAL	Ysr	

Medan, 23 November 2018

Diketahui/Ditetujui oleh :
 Dekan,

Dr. Surya Nita S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas Pembangunan Panca Budi
 SOSIAL SAINS
 Drs. NADJIB AK MM
 YUKITA SARI RIKKI SE. Msi AK
 COSINUS MELVIN SITORUS PANE
 Akuntansi
 1625100642
 51
 Penerapan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK NO.16
 Dan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Pada PT. PLN
 (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan

NO	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
	Hal 76 - Kenapa ada tarif penyusutan Melakli 100% ?		
	77 - Kenapa diijal, penyusutan 0% ?		
	78 - Tukar tambah ada Group sejenis dan ada Group tidak sejenis Bagaimana perlakuan di PLN ?		

24/5/2019
 Dr. N. N. N. N.
 Dr. N. N. N. N.

27/5/2019


Medan, 17 Mei 2019

Diketahui dan Disetujui oleh

Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Teip (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

: Universitas Pembangunan Panca Budi

: SOSIAL SAINS

: Drs. AHDJIB AG MM

: YUNITA SARI RIZKI SE. MSi AG

: COSINUS MELVIN SITORUS PANE

: Akuntansi

: 1625100642

Penerapan Akuntansi Aset tetap menurut PSAK NO 16
 Dan Kebijakan Akuntansi Aset tetap Pada PT PUK
 (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan

AL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
5	- Pembikin daftar pustaka - Spasi - Teori mih 10 thn terakhir	YGR	
5	- Daftar isi - B. Inggris ditulis miring - Spasi - DAFTAR Pustaka	YGR	
10	- ACC Sidang Meja Hijau	YGR	

Medan, 19 Juni 2019

Diketahui/Ditetapkan oleh:

Dekan/Fakultas



Unit Induk Wilayah Sumatera Utara

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Medan

Surat No. 8 Medan 20112

(1) 4142888

F(061) 4152289

W www.pln.co.id

Referensi : 0116. /STH.00.01 /MED/2019

28 Oktober 2019

Asal :
: -
: -
: -
: Selesai Riset

Kepada :

Dekan Fakultas Sosial Sains
Universitas Panca Budi

Jl. Gatot Subroto KM 4.5
Medan

Menunjuk surat kami terdahulu No. 0028/STH.00.01/MED/2019 tanggal 17 Oktober 2019, perihal izin riset, maka dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cosinus Melvin Sitorus Pane

NPM : 1625100642

Fakultas : Sosial Sains, Universitas Panca Budi

Telah selesai melaksanakan riset dengan judul : Penerapan Akuntansi Menurut PSAK 16 dan Kebijakan Akuntansi Tetap Pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan, pada tanggal 27 Oktober 2019 di PT PLN (Persero) Area Medan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

BAGIAN SDM & ADM

FAUZIAH



31



Dsn P Najib

Terakhir dilihat hari ini pukul 12.03



Sab, 18 Jul

Selamat pagi pak,
Saya Cosinus sitorus mahasiswa
bimbingan bapak,
Apa kabar pak?
Mohon maaf sebelumnya pak saya mau
konsultasi mengenai skripsi saya pak,
saya sudah perbaiki sesuai rekomendasi
dari bu Herawati dan pak junawan,
mohon petunjuk pak, tks sebelumnya
pak 🙏🙏🙏

Bapak, ok saja.

Baik pak, Tks pak
Salam sehat pak 🙏🙏🙏

Sama sama.



Bu Yunita Sari Rioni



**PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP MENURUT
PSAK NO. 16 DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET
TETAP PADA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH
SUMATERA UTARA AREA MEDAN**

SKRIPSI

Dyandra Lania Murnida, Program Studi
Magister Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia
Murnida, Dyandra Lania (2023)

mohon izin bu, untuk tampilan di pc
sudah sesuai dengan petunjuk ibu, pas
di buka di hp berubah bu 🙏

Ok

mohon petunjuk selanjutnya bu

Jilid lux ih

tnks bu





YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

KARTU KEMAJUAN MAHASISWA
(KKM)

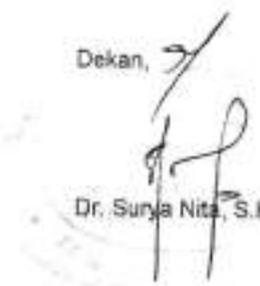
COSINUS MELVIN SITORUS PANE
1625100642

Program Studi : Akuntansi (S1)
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Bisnis

Kode MK	Mata Kuliah	WP	SMT	SKS	NH	NA	K x N
510000101	Pendidikan Agama	W	1	2	B	3	6
510000102	Bahasa Inggris Akuntansi I	W	1	2	C	2	4
510000103	Metafisika I	W	1	2	B	3	6
510000111	Pengantar Akuntansi I	W	1	3	B	3	9
510000112	Pengantar Bisnis	W	1	3	C	2	6
510000113	Pengantar Ekonomi Mikro	W	1	3	B	3	9
510000114	Matematika Ekonomi	W	1	3	B	3	9
510000115	Pengantar Manajemen	W	1	2	B	3	6
510000204	Metafisika II	W	2	2	A	4	8
510000205	Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila	W	2	2	B	3	6
510000206	Bahasa Indonesia/ Penulisan Ilmiah	W	2	2	B	3	6
510000217	Pengantar Aplikasi Komputer	W	2	3	B	3	9
510000218	Statistik Ekonomi I	W	2	2	A	4	8
510000219	Pengantar Akuntansi II	W	2	3	C	2	6
510000220	Pengantar Ekonomi Makro	W	2	3	B	3	9
510000221	Hukum Bisnis dan Regulasi	W	2	3	B	3	9
510000322	Statistik Ekonomi II	W	3	2	B	3	6
510000323	Akuntansi Komputer & Aplikasi	W	3	3	B	3	9
510000328	Akuntansi Biaya I	W	3	3	B	3	9
510000329	Akuntansi Keuangan I	W	3	3	B	3	9
510000330	Manajemen Keuangan I	W	3	3	B	3	9
510000331	Akuntansi Sektor Publik	W	3	3	B	3	9
510000334	Etika Profesi Akuntansi	W	3	3	A	4	12
510000432	Sistem Informasi Akuntansi I	W	4	3	B	3	9
510000433	Akuntansi Biaya II	W	4	3	B	3	9
510000434	Akuntansi Keuangan II	W	4	3	C	2	6
510000435	Bahasa Inggris Akuntansi II	W	4	2	C	2	4
510000436	Akuntansi Perpajakan	W	4	3	B	3	9
510000437	Manajemen Keuangan II	W	4	3	B	3	9
510000438	Akuntansi Syariah	W	4	3	B	3	9
510000541	Teori Akuntansi	W	5	3	B	3	9
510000542	Akuntansi Keuangan Lanjutan I	W	5	3	B	3	9
510000543	Auditing I	W	5	3	B	3	9
510000544	Akuntansi Manajemen Sektor Bisnis	W	5	3	B	3	9
510000545	Anggaran Perusahaan Sektor Bisnis	W	5	3	C	2	6
510000546	Sistem Pengendalian Manajemen Bisnis	W	5	3	A	4	12
510000566	Akuntansi Perpajakan Lanjutan	W	5	3	B	3	9
510000627	Metodologi Penelitian Akuntansi	W	6	3	B	3	9
510000651	Auditing II	W	6	3	A	4	12
510000652	Sistem Informasi Akuntansi II	W	6	3	B	3	9

Kode MK	Mata Kuliah	WP	SMT	SKS	NH	NA	K x N
510000653	Manajemen Perpajakan	P	6	3	B	3	9
510000654	Analisis Investasi & Pasar Modal	P	6	3			
510000667	Perilaku Keorganisasian	W	6	3	A	4	12
510001655	Akuntansi Keuangan Lanjutan II	W	6	3	A	4	12
510001656	Analisis Laporan Keuangan Bisnis	W	6	3	B	3	9
510000709	Komunikasi Bisnis	P	7	2			
510000710	Metafisika III	W	7	2	B	3	6
510000763	Bisnis Internasional	W	7	3	A	4	12
510000768	Internal Audit	W	7	3	B	3	9
510000772	Manajemen Strategi	P	7	2	B	3	6
510000773	Kewirausahaan	W	7	3	B	3	9
510000774	Kuliah Kerja Nyata/ Magang	W	7	2	B	3	6
510001769	Seminar Akuntansi Bisnis	W	7	3	A	4	12
510000875	Komprehensiv	W	8	2	E	0	0
510000876	Skripsi	W	8	4	E	0	0
Jumlah SKS Terambil					146		429
IP Kumulatif					2.94		

Dekan,



Dr. Sunja Nita, S.H., M.Hum.

Keterangan :

- P = Wajib/Pilihan
 H = Nilai Huruf
 A = Nilai Angka

ABSTRAK

Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah akuntansi terhadap aset pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah sesuai dengan PSAK No 16 demikian pula terhadap kebijakan yang saat ini diterapkan. Penelitian ini sendiri menggunakan metode pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi, studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini. Dan untuk analisa data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan sifat deskriptif. Pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan akuntansi dan kebijakan akuntansi yang berlaku pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah sesuai dengan PSAK No.16 Tahun 2015. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi aset tetap PSAK No 16 Tahun 2015 pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan Sudah sesuai dan Kebijakan Akuntansi sudah sesuai dengan PSAK NO. 16 Tahun 2015.

Kata Kunci : Aset Tetap, PSAK No. 16 Tahun 2016, Akuntansi Aset Tetap, Kebijakan Akuntansi, PT PLN (Persero)

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out whether the accounting of assets in PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) is in accordance with PSAK No. 16 thus the pattern of policies currently being applied. This research itself uses data collection methods, namely by documentation, library research, observation and interviews. Qualitative research is the approach taken in this study. and for the analysis of the data used is a qualitative analysis technique with descriptive nature. In this study it can be concluded that the application of accounting and accounting policies that apply to PT Perusahaan Listrik Negara(Persero) is in accordance with PSAK No. 16 of 2015. From the results of the research that has been done, it can be concluded that the adoption of fixed asset accounting PSAK NO. 16 of 2015 at PT PLN (Persero) North Sumatra Region Medan Area is in accordance and Accounting Policy is in accordance with PSAK No. 16 of 2015.

Keywords : Fixed assets, PSAK No. 16 of 2015, Accounting for Fixed Assets, Accounting Policies and PT PLN (Persero)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat mengajukan proposal ini yang disusun guna memenuhi syarat untuk pembuatan skripsi. Adapun judul yang diajukan adalah sebagai berikut: “Penerapan Akuntansi Aset Tetap Menurut Psak No. 16 Dan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini menghadapi banyak permasalahan dan kesulitan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggungjawab selaku mahasiswa dan bantuan dari semua pihak baik material maupun moril sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Oleh karena itu izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. **Bapak** Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di kampus tercinta ini.
2. **Ibu** Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi beserta seluruh stafnya.
3. **Bapak** Junawan, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi beserta seluruh stafnya.

4. **Bapak** Drs. Nadjib, Ak., MM., selaku pembimbing I, dan juga mentor dalam berbagai hal bagi penulis, yang telah mendorong, membantu, dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
5. **Ibu** Yunita Sari Riono, SE., M.Si., Ak., selaku Pembimbing II, dan juga mentor dalam berbagai hal bagi penulis, yang telah mendorong, membantu, dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar, baik dosen maupun asistennya, staf pegawai di lingkup Universitas Pembangunan Panca Budi.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Pilian Sitorus dan Mama Tonggo Situmorang yang telah mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, cucuran keringat dan air mata, untaian doa serta pengorbanan tiada henti, yang hingga kapanpun penulis tidak akan bisa membalasnya. Buat Bapak dan Mama, sehat selalu dan panjang umur. Tuhan selalu menjaga dan melindungi Bapak dan Mama dimanapun berada.
8. Keluarga kecilku istri tercinta Lisa Agustina Tampubolon, AMKeb bos besar Haezer Sitorus Pane dan Adek Glenn Haposan Sitorus Pane yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini, yang telah mencurahkan kasih sayang, dorongan moril dan materil. Semoga keluarga kita bisa menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera.
9. Teman-teman KK II LJ1, KK II LJ 2 adek Tiur Tobing, Kak Iciana Purba, adek Rose, adek Wina dan Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Sosial Sains. Terima kasih untuk proses yang kita lalui.

10. Bapak Ibu pihak manajemen PT PLN (Persero) unit induk Wilayah Sumatera Utara UP3 Medan, terimakasih telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian.
11. Seluruh keluarga, teman seperjuangan dan sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian studi penulis, terutama yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi ini, terima kasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini nantinya akan banyak permasalahan dan kesulitan, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, sangat diharapkan masukan dan bimbingan dari semua pihak.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga nantinya skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca sekalian, dan semoga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Medan, Agustus 2020
Penulis

Cosinus Melvin Sitorus Pane
1625100642

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	9
1. Definisi Aset Tetap	9
2. Karakteristik Aset Tetap	12
3. Pengakuan.....	14
4. Pengukuran Saat Pengakuan	15
5. Pengukuran Setelah Pengakuan.....	31
6. Penghentian Pengakuan	43
7. Penyajian	44
8. Pengungkapan	44
9. Kebijakan Akuntansi	48
B. Penelitian Sebelumnya	53
C. Kerangka Pemikiran	57
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	58
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	58
C. Jenis dan Sumber Data	59
D. Teknik Pengumpulan Data	60
E. Teknik Analisis Data	62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	63
1. Gambaran Umum Perusahaan	63

2. Kebijakan Akuntansi	72
B. Pembahasan	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	90
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Daftar Penelitian Sebelumnya 53
Tabel 3.1	Skedul Proses Penelitian 59
Tabel 4.1	Daftar Kode Aset PT PLN (Persero) 71
Tabel 4.2	Daftar persentase dan umur ekonomis Aset Tetap 81
Tabel 4.3	Neraca PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan 85
Tabel 4.4	Hasil Evaluasi Penerapan PSAK No. 16..... 89

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	57
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	66
Gambar 4.2 Alur proses pengakuan aset tetap dari pembangunan sendiri.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perusahaan merupakan organisasi modern yang mempunyai kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Baik itu perusahaan jasa, perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Biasanya disamping mencari laba, tujuan perusahaan mencakup pertumbuhan yang terus menerus, kelangsungan hidup dan kesan positif dimata *public* (Pahlepi, 2011).

Menurut Soemarso (2011) mengemukakan bahwa aset tetap merupakan aset berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun, digunakan dalam kegiatan perusahaan, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan serta nilainya cukup besar. Mengenai pengukuran aset tetap dapat dibagi kedalam dua bagian yaitu: 1) Pengukuran awal ketika aset tetap tersebut diperoleh, 2) Pengukuran setelah pengakuan awal. “Aset diperlukan dalam melaksanakan kegiatan yang ada di perusahaan. Aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu, SFAC No. 6, prg. 25” (Suwardjono, 2016: 252).

Untuk mendukung kegiatan operasionalnya, setiap bentuk badan usaha yang ada saat ini mulai dari yang berukuran kecil hingga yang besar pasti akan memanfaatkan aktiva miliknya. Contoh dari aktiva operasi yang dimiliki perusahaan adalah aktiva tetap dan aktiva tidak tetap berwujud, yang merupakan aktiva operasi tidak lancar atau jangka panjang (I Lery dan Widyawati, 2015: 2).

Setiap perusahaan memiliki kebijakan akuntansi tersendiri dalam penerapan aset tetapnya. Agar kelancaran operasional perusahaan terjaga, maka diperlukan standar akuntansi dalam penerapan akuntansi aset tetap perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas “Pasal 66 ayat (3) menyatakan bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan“. Indonesia sendiri memiliki Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang menjadi pedoman bagi setiap perusahaan di Indonesia, yang menjadi pertanyaan adalah apakah setiap perusahaan di Indonesia telah berpedoman kepada PSAK dalam aktivitas usahanya.

BUMN di Indonesia wajib menerapkan Internasional *Financial Reporting Standards* sesuai dengan Surat Edaran Kementerian BUMN No. S-156/D4.MBU/2010. Namun, sesuai tenggat jadwal yaitu tahun 2012 masih ada beberapa BUMN yang kesulitan dalam menerapkan IFRS, pada Workshop Implementasi IFRS di BUMN di Hotel Bandung pada tanggal 9 Mei 2014 (Suryanto, 2014).

PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan. PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), didirikan dengan tujuan utama menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai, berupa memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menuju pemerataan pembangunan. Aset tetap pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan mempunyai peran penting dalam kelangsungan usaha perusahaan.

Aset Tetap yang dimiliki PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan terdiri dari beberapa jenis Aset Tetap yaitu, Gardu Distribusi, Jaringan SKTM, Jaringan HUTM, Bangunan dan Tanah. Aset Tetap seperti Gardu Distribusi tidak pernah sampai habis umur manfaatnya sudah rusak. Aset yang rusak pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara akan di ATTB kan dan nilai sisa Nol.

PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan dapat menjalankan bisnis kelistrikan dengan adanya aset tetap yang baik dan siap pakai untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan. Aset yang dibangun sendiri apabila sudah diserahkan akan dioperasikan untuk menjalankan bisnis kelistrikan, Hal ini akan berakibat umur ekonomis suatu aset secara fisik dan buku tidak sama dikarenakan aset akan di akui apabila berkas dokumen sudah lengkap dan diserahkan kebagian akuntansi.

Kebijakan Akuntansi yang tertulis dan terdokumentasikan di PLN, terakhir disusun tahun 1994, walaupun dalam praktek penyusunan laporan keuangan telah mengadopsi PSAK terkini, namun perlu juga diikuti pemutahiran kebijakan Akuntansi PT.PLN(Persero) dengan berpedoman pada PSAK yang konvergen dengan IFRS, sebagai pedoman tertulis kepada para pelaku dan pelaksana penyusunan laporan keuangan di lingkungan PT.PLN (Persero).

Pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pemilihan metode Penyusutan adalah garis lurus dengan nilai residu nol. Rata- rata aset distribusi yang dimiliki tidak pernah sampai habis umur ekonomisnya dan aset yang rusak akan di ATTB kan dengan nilai sisa nol.

Kebijakan Akuntansi yang tertulis dan terdokumentasikan di PLN, terakhir disusun tahun 1994, walaupun dalam praktek penyusunan laporan keuangan telah mengadopsi PSAK terkini, namun perlu juga diikuti pemutahiran kebijakan Akuntansi PT. PLN(Persero) dengan berpedoman pada PSAK yang konvergen dengan IFRS, sebagai pedoman tertulis kepada para pelaku dan pelaksana penyusunan laporan keuangan di lingkungan PT. PLN (Persero).

Berdasarkan uraian diatas, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian atas penerapan akuntansi aset tetap menurut PSAK Nomor 16 dan kebijakan akuntansi aset tetap pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan. PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), didirikan dengan tujuan utama menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai, berupa memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menuju pemerataan pembangunan. Aset tetap pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan mempunyai peran penting dalam kelangsungan usaha perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penerapan Akuntansi Aset Tetap Menurut Psak No. 16 Dan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dalam penelitian ini ada dua identifikasi dan batasan masalah yaitu :

1. Pengakuan Aset Tetap pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan yang dibangun sendiri sering kali tidak sesuai dengan periode pembukuan. Seperti contoh Pembangunan Jaringan (Gardu Listrik), dimana Gardu Listrik tersebut diakui pada saat masuknya tagihan atau pada saat dilakukan pembayaran atas biaya pembangunan sedangkan aset sudah terpasang bulan sebelumnya dan sudah di BASTP.
2. Kebijakan Akuntansi pada pemilihan metode penyusutan aset tetap Gardu Distribusi dengan metode Garis lurus tidak efektif karena nilai sisa aset nol dan pemanfaatan aset tersebut tidak sampai habis umur ekonomisnya

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan masalah yang akan diangkat mengenai aset tetap, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kesesuaian antara pengakuan, penyajian, pengukuran dan pengungkapan aset tetap menurut PSAK No. 16 pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatra Utara Area Medan?
2. Bagaimanakah kebijakan akuntansi aset tetap pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatra Utara Area Medan?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Untuk mengetahui kesesuaian antara pengakuan, penyajian, pengukuran dan pengungkapan aset tetap menurut PSAK No. 16 pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatra Utara Area Medan;
- b. Untuk mengetahui kebijakan akuntansi aset tetap pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatra Utara Area Medan;

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan tentang penerapan akuntansi aset tetap pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan.

b. Manfaat Bagi Universitas Pembangunan Panca Budi

Diharapkan dapat menambah informasi dan referensi perpustakaan dan memberikan manfaat bagi mahasiswa lain dalam penelitian lebih lanjut.

c. Manfaat Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam menciptakan penerapan yang lebih baik.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Agnes Fanda Salainti (2013) yang berjudul “Evaluasi Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Area Manado”. Hasil dalam penelitian Agnes Fanda Salainti, menunjukkan bahwa:

1. Perusahaan menerapkan harga perolehan (*historical cost*) sebagai dasar dalam mengukur aset tetapnya.
2. Pengeluaran setelah pengeluaran perolehan aset tetap, meliputi pengeluaran-pengeluaran rutin selama penggunaan aset tetap pada perusahaan seperti rehabilitasi, renovasi, restorasi, dan reparasi menurut standar akuntansi keuangan harus diperlakukan sebagai pengeluaran modal.
3. Semua aset tetap pada perusahaan telah memenuhi syarat untuk disusutkan.
4. Metode penyusutan terhadap seluruh jenis aset tetapnya telah dilaksanakan secara konsisten dan tidak menyimpang dari standar akuntansi keuangan yang berlaku. Perusahaan melakukan penyusutan terhadap seluruh jenis aset tetapnya kecuali tanah dan aset tetap dalam pelaksanaan dengan menggunakan metode penyusutan Garis Lurus (*Straight Line Method*) berdasarkan taksiran masa manfaat umur ekonomis tanpa nilai residu.

Perbedaan penelitian ini terletak pada :

1. Objek penelitian terdahulu adalah PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Area Manado, sedangkan objek penelitian ini adalah PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan.
2. Penelitian terdahulu diadakan pada tahun 2013 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2018.

3. Penelitian terdahulu menggunakan data periode 2012, sedangkan penelitian ini menggunakan data periode 2017.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Definisi Aset Tetap

Menurut Pulungan (2013:1) “Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian-kejadian ekonomi sebuah organisasi pihak-pihak yang berkepentingan”.

Menurut Pura (2012:4-5) menyatakan bahwa akuntansi dipandang sebagai suatu proses, seni, dan seperangkat pengetahuan yang pada dasarnya mengarah pada suatu aktivitas atau kegiatan dalam akuntansi itu sendiri. Karena itu, pengertian akuntansi tersebut menjadi suatu proses, seni, atau seperangkat pengetahuan yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam bidang tersendiri yang meliputi kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan atas suatu kejadian atau transaksi keuangan dalam perusahaan yang kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Suwardjono (2016: 10), Sebagai seperangkat pengetahuan, akuntansi dapat didefinisi sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentudan cara penyimpanan (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang bekepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi. Dalam arti sempit sebagai proses, fungsi, atau praktik, akuntansi dapat didefinisi sebagai proses

pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasikan, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar (bahan olah akuntansi) yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan.

Aset merupakan elemen neraca yang akan membentuk informasi *semantic* berupa posisi keuangan bila dihubungkan dengan elemen yang lain yaitu kewajiban dan ekuitas. Aset merepresentasi potensi jasa jika fisis dan nonfisis yang memungkinkan badan usaha untuk menyediakan barang dan jasa.

Financial Accounting Standards Board (FASB) mendefinisikan aset dalam kerangka konseptualnya sebagai berikut: "*Assets are probable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity as a result of past transactions or events*" (Aset adalah manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu). SFAC No. 6. Prg. 25. (Suwardjono, 2014:252)

Menurut Suwardjono (2014: 254), Terdapat tiga karakteristik utama yang harus dipenuhi agar suatu objek atau pos dapat disebut aset yaitu: (a) manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti, (b) dikuasai atau dikendalikan oleh entitas, dan (c) timbul akibat transaksi masa lalu. Kriteria (a) merupakan criteria utama dan lebih memuat aspek *semantic* sedangkan criteria (b) dan (c) lebih memuat aspek pengakuan dari pada *semantic*.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Tahun 2015 "Aset tetap adalah aset

berwujud yang (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan (b) diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”.

Berdasarkan definisi di atas terdapat beberapa hal penting terkait aset tetap, yaitu:

- a. Aset tetap adalah aset berwujud, yaitu mempunyai bentuk fisik (seperti tanah, bangunan), berbeda dengan paten atau merek dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik (merupakan aset tak berwujud).
- b. Aset tetap mempunyai tujuan penggunaan khusus, yaitu digunakan dalam produksi dan penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Aset tanah yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual, bukan merupakan aset tetap.
- c. Aset tetap termasuk ke dalam aset tidak lancar, karena diharapkan akan digunakan untuk lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. (Martani, dkk. 2014: 271)

Menurut Hery dan Widyawati (2015: 2) “Aktiva tetap (*fixed assets*) adalah aktiva yang secara fisik dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relatif permanen serta memiliki masa kegunaan (*usefull life*) yang panjang. Aktiva tetap merupakan aktiva yang berwujud (*tangible assets*)”.

Menurut Kieso, D.E et. Al. (2009: 2) “Perusahaan seperti *Boeing*, *Target*, dan *Starbuck* menggunakan aktiva yang bersifat tahan lama. Aktiva seperti itu, umumnya disebut sebagai properti, pabrik, dan peralatan

(*property, plant, and equipment*). Istilah lain yang biasanya digunakan yaitu aktiva pabrik (*plant assets*) dan aktiva tetap (*fixed assets*)”.

Menurut Martani, dkk. (2014: 270) “Aset tetap dan properti investasi merupakan komponen dari aset tidak lancar. Aset tetap merupakan komponen aset yang paling besar nilainya dalam neraca (Laporan Posisi Keuangan) sebagai besar perusahaan, terutama perusahaan padat modal seperti perusahaan manufaktur”. Contoh dari aset tetap adalah tanah, bangunan, peralatan, dan kendaraan yang digunakan entitas dalam kegiatan operasionalnya dan bukan ditujukan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan. Apabila entitas membeli tanah dengan tujuan akan dijual kembali karena entitas menyakini tanah tersebut akan mengalami peningkatan nilai, maka tanah tersebut bukan merupakan aset tetap, tetap merupakan properti investasi (PSAK 13 Properti Investasi). Jika entitas bergerak di bidang jual beli mobil, maka mobil yang diperoleh entitas dengan tujuan untuk dijual kembali merupakan persediaan (PSAK 14 Persediaan), bukan aset tetap.

2. Karakteristik Aset Tetap

Properti, pabrik dan peralatan meliputi tanah, struktur bangunan (kantor, pabrik, gudang), dan peralatan (mesin, perabotan, perkakas). Karakteristik utama dari properti, pabrik, dan peralatan adalah:

- a. Aktiva tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan bukan untuk dijual kembali. Hanya aktiva yang digunakan dalam operasi normal yang dapat diklasifikasikan sebagai properti pabrik, dan

peralatan. Sebagai contoh, sebuah bangunan yang tidak digunakan lebih tepat diklasifikasikan sebagai investasi. Tanah yang dimiliki *subdivider* lebih tepat diklasifikasikan sebagai persediaan.

- b. Aktiva tersebut bersifat jangka panjang dan merupakan subjek penyusutan. Properti, pabrik dan peralatan dapat digunakan selama beberapa tahun. Perusahaan mengalokasikan biaya investasi dalam aktiva-aktiva ini pada periode masa depan melalui beban penyusutan *periodic*. Namun hal itu tidak berlaku pada tanah, yang tidak disusutkan kecuali terjadi penurunan nilai yang material, seperti hilangnya kesuburan tanah pertanian akibat rotasi tanaman yang jelek, kekeringan, atau erosi.
- c. Aktiva tersebut memiliki substansi fisik. Properti, pabrik dan peralatan merupakan aktiva berwujud yang mempunyai karakteristik eksistensi atau substansi fisik. Hal ini yang merupakan karakteristik dari properti, pabrik, dan peralatan, sehingga membedakannya dari aktiva tidak berwujud, seperti paten atau *goodwill*. Akan tetap, tidak seperti bahan baku, properti, pabrik, dan peralatan secara fisik bukan merupakan bagian dari produk yang dimiliki untuk dijual kembali. (Kieso, D.E et. al. 2009: 2-3)

Aset tetap memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Memiliki substansi fisik, artinya memiliki wujud fisik.
- b. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, artinya digunakan oleh perusahaan dalam operasional sehari-hari (*owner occupied property*).

- c. Dipergunakan dalam jangka panjang, biasanya lebih dari satu tahun. Aset tetap memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Sebagai contoh, bangunan biasanya dapat dipergunakan sampai lebih dari 40 tahun. Pesawat terbang dapat beroperasi lebih dari 10 tahun. Oleh karena masa manfaat aset tetap yang lebih dari satu tahun, aset tetap tidak lancar. (Pulungan, dkk. 2013: 163-164)

3. Pengakuan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Tahun 2015 Paragraf 07, biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika hanya jika:

- a. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut; dan
- b. Biaya perolehannya dapat diukur secara andal.

Ini merupakan prinsip pengakuan umum untuk aset tetap. Prinsip ini diterapkan pada saat pengakuan awal aset, pada saat ada bagian tertentu dari aset yang diganti, dan jika ada pengeluaran tertentu yang terjadi terkait dengan aset tersebut selama masa manfaatnya. Jika pengeluaran tersebut menimbulkan manfaat ekonomi di masa depan, maka dapat diakui sebagai aset. (Martani, dkk. 2014: 272)

4. Pengukuran Saat Pengakuan

a. Elemen Biaya Perolehan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Tahun 2015 Paragraf 06, Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang distribusikan pada aset ketika pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain, contohnya PSAK 53: Pembayaran Berbasis Saham.

“Paragraf 15, aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan”.

Paragraf 16, biaya perolehan aset tetap meliputi:

- 1) Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain.
- 2) Setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen.
- 3) Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama priode tersebut.

Paragraf 17, contoh biaya yang dapat distribusikan secara langsung adalah:

- 1) Biaya imbalan kerja (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 24: Imbalan kerja) yang timbul secara langsung dari konstruksi atau perolehan aset tetap;
- 2) Biaya penyiapan lahan untuk pabrik;
- 3) Biaya penaganaan dan penyerahan awal;
- 4) Biaya instalasi dan perakitan;
- 5) Biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik, setelah dikurangi hasil neto penjualan setiap produk (seperti contoh hasil dari peralatan yang sedang diuji); dan
- 6) *Fee professional*.

Paragraf 19, Contoh biaya yang bukan merupakan biaya perolehan aset tetap adalah:

- 1) Biaya pembukaan fasilitas baru;
- 2) Biaya pengenalan produk atau jasa baru (termasuk biaya iklan dan aktivitas promosi)
- 3) Biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelas pelanggan baru (termasuk biaya pelatihan staf); dan
- 4) Biaya administrasi dan biaya *overhead* umum lain.

Paragraf 20, pengakuan biaya dalam jumlah tercatat aset tetap dihentikan ketika aset tetap tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intence manajemen. Oleh karena itu, biaya pemakaian dan pengembangan aset

tidak dimasukkan dalam jumlah tercatat aset tersebut. Sebagai contoh, biaya berikut ini tidak termasuk dalam jumlah tercatat aset tetap:

- 1) Biaya yang terjadi ketika aset telah mampu beroperasi sesuai dengan intens manajemen namun belum digunakan atau masih beroperasi di bawah kapasitas penuh;
- 2) Kerugian awal operasi, seperti ketika permintaan terhadap *output* masih rendah; dan
- 3) Biaya relokasi atau reorganisasi sebagian atau seluruh operasi entitas.

Menurut Hery dan Widyawati (2015: 2-3), Harga perolehan aktiva tetap meliputi seluruh jumlah yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tersebut. Aktiva tetap akan dilaporkan dalam neraca tidak hanya sebesar harga belinya saja, tetapi juga termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aktiva tetap tersebut siap untuk dipakai.

- 1) Harga perolehan tanah

Harga perolehan tanah tidak hanya terdiri harga beli saja, melainkan juga termasuk biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut dapat dipergunakan, seperti biaya survei, pajak, komisi broker, biaya pengurusan surat untuk mendapatkan hak kepemilikan atas tanah, biaya pembersihan/ pengosongan/ pembongkaran bangunan lama yang tidak dikehendaki (*clearing cost*) dan biaya pengukuran (*grading cost*). Disisi lain, jika seandainya di atas tanah yang baru dibeli tersebut sudah terdapat bangunannya dan pada akhirnya bangunan tersebut harus dirobohkan

agar supaya dapat dibangun bangunan baru yang sesuai dengan kehendak atau kebutuhan pemakai (pembeli), maka hasil dari penjualan puing-puing diatas bongkaran bangunan lama tersebut justru akan diperhitungkan sebagai pengurang dari harga perolehan tanah.

Sedangkan untuk menyempurnakan tanah (*land improvements*), seperti pembuatan tempat parkir, taman, pengaspalan, pemagaran, harga perolehannya meliputi pembelian bahan (*materials*), pembayaran upah tukang atau teknisi, dan biaya tidak langsung lainnya.

2) Harga perolehan bangunan

Harga perolehan bangunan terdiri atas harga beli, pajak, komisi *broker*, biaya pengurusan surat untuk mendapatkan hak kepemilikan atas bangunan, dan biaya rekondisi sebelum penempatan. Untuk bangunan yang dibangun sendiri, maka harga perolehannya terdiri atas biaya ijin membangun, biaya untuk membeli bahan-bahan bangunan, bahkan termasuk bunga atas dana yang dipinjam untuk membiayai pembagunan gedung baru tersebut.

3) Harga perolehan untuk peralatan

Seperti yang telah disebut sebelumnya, biasanya terdiri atas harga beli, pajak, ongkos angkut, biaya asuransi selama dalam perjalanan, ongkos pemasangan, dan biaya uji coba sampai peralatan tersebut benar-benar dapat dioperasikan dan dimanfaatkan.

Untuk pembelian peralatan bekas, biaya rekondisi sebelum pemakaian juga merupakan bagian dari harga perolehan aktiva bersangkutan.

b. Pengukuran Biaya Perolehan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Tahun 2015, Paragraf 23, biaya perolehan aset tetap adalah setara harga tunai pada tanggal pengakuan. Jika pembayaran ditangguhkan melampaui jangka waktu kredit normal, maka perbedaan antara harga tunai dan total pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit kecuali beban bunga selama periode kredit kecuali beban bunga tersebut dikapitalisasi sesuai dengan PSAK 26: Biaya Pinjaman.

1) Cara perolehan aset tetap

Dalam Hery dan Widyawati (2015: 6-18), Ketika aktiva dibeli secara tunai, pembelian ini akan dicatat secara sederhana sebesar jumlah kas yang dibayar, termasuk seluruh pengeluaran-pengeluaran yang terkait dengan pembelian yang penyiapannya sampai aktiva tersebut dapat digunakan. Aktiva juga dapat diperoleh dengan cara lainnya (selain dibeli tunai). Dalam hal ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana cara menentukan besarnya harga peroleh. Selain dibeli secara tunai, aktiva juga dapat diperoleh melalui:

a) Pembelian gabungan

Dalam beberapa kasus transaksi pembelian aktiva, sejumlah aktiva dapat diperoleh secara bersamaan melalui sebuah

pembelian gabungan (*basket purchase*) dengan satu harga beli. Untuk menghitung besarnya harga perolehan atas dasar masing-masing aktiva, total harga beli ini harus dialokasikan diantara masing-masing aktiva yang dibeli tersebut.

Ketika bagian dari harga beli dapat secara jelas dikaitkan dengan aktiva tertentu, maka harga perolehan dari aktiva tertentu tersebut dapat langsung ditetapkan, dan sisa saldo harga beli akan dialokasikan diantara aktiva lainnya yang tersisa. Namun, ketika tidak ada bagian dari harga beli yang dapat secara jelas dikaitkan dengan aktiva tertentu, maka seluruh jumlah harga beli seharusnya dialokasikan diantara masing-masing aktiva yang beli tersebut. Untuk mengalokasikan harga beli gabungan ke masing-masing aktiva, taksiran nilai aktiva dapat diberikan oleh pihak yang independen dan memiliki kompetensi dibidangnya.

b) Pembelian Kredit

Pembelian aktiva tetap dapat dilakukan secara kredit. Dalam hal ini, pembeli biasanya akan menandatangani wesel bayar (*promes*), yang secara spesifik menyebutkan persyaratan mengenai penyelesaian kewajiban. Kontrak pembelian kredit ini memerlukan pembayaran pada satu tanggal tertentu atau serangkaian pembayaran pada interval periode tertentu yang telah disepakati. Bunga atas saldo kredit yang belum dibayar akan dicatat dan diakui sebagai beban bunga.

c) Sewa guna usaha

Sewa guna usaha modal adalah suatu kontrak dimana satu pihak (penyewa) diberikan hak untuk menggunakan aktiva yang dimiliki oleh pihak lain, yaitu pihak yang menyewakan, selama satu periode waktu tertentu dengan membayar sejumlah biaya periodik tertentu. Pada hakekatnya, sewa guna usaha modal secara ekonomis sama dengan pembelian aktiva tetap secara kredit jangka panjang. Untuk kasus sewa guna usaha modal ini, aktiva yang disewaguna usahakan akan dicatat sebagai aktiva tetap dalam pembukuan penyewa (*lessee*) selaku pengguna aktiva, dan bukan dalam pembukuan perusahaan yang secara hukum masih memiliki aktiva tersebut, dalam hal ini adalah si pemberi sewa (*lessor*). Aktiva pada sewaguna usaha modal dicatat sebesar nilai sekarang (*present value*) dari serangkaian pembayaran sewa dimasa depan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 16 Tahun 2015 “Paragraf 27 biaya perolehan aset tetap yang dicatat oleh *lessee* dalam sewa pembiayaan ditentukan sesuai dengan PSAK 30: Sewa”.

Dalam Syukur (2015: 249-251) Menurut ketentuan dalam pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.03/1988 tanggal 20 Desember 1988 dinyatakan bahwa sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak

milik atas barang objek transaksi sewa guna usaha, hak miliki (legal title) atas aktiva yang disewa guna usaha akan tetap berada pada perusahaan sewa guna usaha meskipun berdasarkan perjanjian sewa guna usaha bertanggung jawab atas penggunaan aktiva tersebut diserahkan kepada penyewa guna usaha.

Terlepas dari ketentuan tersebut, ditinjau dari aspek akuntansi pada paragraf 35 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dinyatakan bahwa laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomi (*economic substance*) dari suatu peristiwa/transaksi daripada bentuk hukumnya (*legal form*). Karena transaksi *capital lease* yang berdasarkan makna ekonominya merupakan pemindahan dari seluruh manfaat serta resiko yang melekat pada pemilikan sesuatu aktiva, maka transaksi tersebut sudah dapat dipandang sebagai transaksi perolehan suatu aktiva dan terjadinya kewajiban bagi penyewa guna usaha.

Transaksi *capital lease* diperlukan dan dicatat sebagai perolehan aktiva dan timbulnya kewajiban sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar oleh penyewa guna usaha pada akhir masa guna usaha. Selama masa sewa guna usaha setiap pembayaran sewa guna usaha dialokasikan dan dicatat sebagai pembayaran angsuran pokok kewajiban sewa guna usaha dan pembayaran bunga.

Sangat jelas bahwa unsur utama harga perolehan suatu aktiva tetap yang diperoleh melalui *capital lease* adalah sebesar nilai tunai dari total pembayaran yang dilakukan, sedangkan selisih antara total pembayaran angsuran yang akan dilakukan dengan nilai tunainya diperlakukan sebagai beban bunga yang ditangguhkan yang akan diamortisasi sebagian selama periode pembayaran angsuran sewa guna usaha. Penentuan nilai tunai dilakukan dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Nilai tunai angsuran} = \text{Faktor nilai tunai} \times \text{besarnya tiap-tiap angsuran}$$

d) Pertukaran aktiva tetap

Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat memperoleh sebuah aktiva baru dengan cara menukar aktiva nonmoneter yang ada. Umumnya, aktiva yang baru tersebut akan dicatat sebesar nilai pasar wajar dari aktiva yang diserahkan, mana yang lebih dapat ditentukan dengan mudah. Jika aktiva yang diserahkan untuk dipertukarkan adalah peralatan bekas, maka nilai pasar wajar dari aktiva yang baru umumnya lebih dapat ditentukan dengan mudah dan oleh karena itu akan digunakan untuk mencatat pertukaran.

“Harga daftar (*list price*) dari sebuah aktiva tidak dapat dijadikan sebagai indikator dalam menentukan besarnya nilai pasar dan biasanya lebih tinggi dari harga tunai aktiva yang sebenarnya. Harga dimana aktiva dapat diperoleh dalam transaksi

tunai adalah nilai pasar wajar yang seharusnya digunakan untuk mencatat perolehan”.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Keuangan (PSAK) No. 16 Tahun 2015 Paragraf 24 satu atau lebih aset tetap mungkin diperoleh dalam pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset dan nonmoneter. Pembahasan berikut mengacu pada pertukaran satu aset nonmeter dengan aset nonmoneter lain, tetapi hal ini juga berlaku untuk seluruh pertukaran yang dideskripsikan dalam kalimat sebelumnya.

Biaya perolehan aset tetap tersebut diukur pada nilai wajar kecuali:

- 1) Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial; atau
- 2) Nilai wajar aset yang diterima dan aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Aset yang diperoleh diukur dengan cara tersebut bahkan jika entitas tidak dapat segera menghentikan pengakuan aset yang diserahkan. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur pada nilai wajar, maka biaya perolehannya diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan.

Paragraf 25 entitas menentukan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial dengan mempertimbangkan sejauh mana arus kas masa depan yang diharapkan dapat berubah

sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:

- 1) Konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) arus kas dari aset diterima berbeda dengan konfigurasi arus kas dari yang diserahkan; atau
- 2) Nilai spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang terpengaruh oleh transaksi berubah sebagai akibat dari pertukaran; dan
- 3) Selisih di (a) atau (b) adalah relatif signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang terpengaruh oleh transaksi tersebut mencerminkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini dapat menjadi jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

Paragraf 26 nilai wajar satu aset dapat diukur secara andal jika:

- 1) Variabilitas dalam rentang pengukuran nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut adalah jika tidak signifikan; atau
- 2) Probabilitas dari beragam estimasi dalam rentang tersebut dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengukur nilai wajar.

Jika entitas dapat mengukur nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari

aset yang diterima, kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

e) Penerbit sekuritas

Ketika saham diterbitkan dalam pertukaran untuk aktiva selain kas, seperti tanah, bangunan, dan peralatan, maka aktiva yang diperoleh harus dicatat sebesar nilai pasar wajarnya. Namun, jika pasar wajar dari aktiva yang diperoleh tidak dapat ditentukan secara objektif, maka harga pasar wajar saham akan digunakan untuk mencatat perolehan aktiva tersebut. Nilai yang ditetapkan tidak pernah dipakai dalam menentukan besarnya harga perolehan dari aktiva yang diterima.

f) Konstruksi (bangun) sendiri

Kadang kala, gedung dibangun oleh perusahaan untuk digunakan sendiri. Ini mungkin dilakukan untuk menghemat biaya konstruksi, memanfaatkan fasilitas yang tidak terpakai, atau untuk mendapatkan kualitas bangunan yang lebih baik. Sama halnya seperti pembelian aktiva, harga perolehan aktiva tetap yang dibangun sendiri meliputi seluruh pengeluaran-pengeluaran yang terjadi sehubungan dengan pembangunan aktiva tersebut hingga siap digunakan.

Bunga bunga yang terjadi atas dana yang dipinjam untuk keperluan konstruksi merupakan bagian yang integral (satu kesatuan) dari biaya konstruksi, sama seperti halnya biasa material (bahan bangunan), upah pekerja bangunan, dan biaya

sewa peralatan konstruksi. Ketika perusahaan membangun sendiri (*self constructed*) aktiva yang akan dipakainya (*own use*), prinsip akuntansi memperbolehkan untuk mengkapitalisasi biaya bunga yang terjadi atas dana konstruksi yang dipinjam. Bunga merupakan biaya konstruksi yang sah, dan penandingan yang tetap antara pendapatan dan beban mengharuskan biaya bunga ini ditanggungkan terlebih dahulu (dikapitalisasi) sebagai harga perolehan bangunan, untuk selanjutnya dibebankan secara proporsional melalui jurnal penyusutan sepanjang umur dari aktiva bersangkutan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Pernyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Tahun 2015 Paragraf 22 biaya perolehan suatu aset yang dikonstruksi sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana aset yang diperoleh bukan dengan konstruksi sendiri. Jika entitas membuat aset serupa untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, biaya perolehan aset biasanya sama dengan biaya konstruksi aset untuk dijual (lihat PSAK 14: Persediaan). Oleh karena itu, dalam menetapkan biaya perolehan maka setiap laba internal dieliminasi. Serupa dengan hal tersebut, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja, atau sumber daya lain dalam aset yang dikonstruksi sendiri tidak termasuk biaya perolehan aset tersebut. PSAK 26:

Biaya Pinjaman menetapkan kriterial pengakuan bunga sebagai komponen jumlah tercatat aset tetap yang dikonstruksi sendiri.

Kapasitas bunga hanya diperbolehkan untuk aktiva yang sedang dibangun sendiri dan akan dipakai untuk kepentingan sendiri. Bunga seharusnya tidak dikapitalisasi untuk persediaan yang diproduksi atau dihasilkan secara berulang, aktiva yang saat ini sedang digunakan, atau aktiva yang tidak terpakai. Ada lima (5) hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung besarnya kapitalisasi bunga yaitu :

- 1) Biaya bunga dihitung mulai ketika pengeluaran pertama kali dilakukan atas proyek dan berlanjut seiring berjalannya proses konstruksi sampai aktiva selesai dibangun dan siap digunakan.
- 2) Besarnya bunga yang akan dikapitalisasi ditentukan dengan menggunakan keseluruhan (akumulasi) pengeluaran yang telah dilakukan atas proyek, dimana masing-masing pengeluaran (pembayaran kas) tersebut akan dihitung rata-rata tertimbang berdasarkan:
 - (a) Lamannya periode waktu antara saat pengeluaran dilakukan sampai dengan akhir periode berjalan (untuk masing-masing pembayaran kas yang dilakukan pada tahun pertama konstruksi), atau
 - (b) Lamannya periode waktu antara saat pengeluaran dilakukan sampai dengan berakhirnya masa proyek

(untuk masing-masing pembayaran kas yang dilakukan pada tahun dimana konstruksi selesai)

- 3) Tingkat suku bunga yang akan digunakan dalam menghitung besarnya kapitalisasi bunga adalah berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - (a) Tingkat bunga yang terjadi untuk pinjaman khusus konstruksi (*specific construction loan*).
 - (b) Rata-rata tertimbang tingkat bunga untuk seluruh pinjaman lainnya yang tidak terkait dengan konstruksi (*general loan*).
- 4) Jika periode konstruksi meliputi lebih dari satu tahun pembukuan, maka akumulasi pengeluaran juga akan pengeluaran juga akan mencakup kapitalisasi bunga tahun sebelumnya.
- 5) Bunga maksimum yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar total bunga yang terjadi selama periode berjalan, dengan kata lain tidak boleh melebihi total bunga yang terjadi Selama periode berjalan.

g) Donasi (sumbangan)

Ketika aktiva diterima melalui donasi (sumbangan), pengeluaran-pengeluaran tertentu mungkin akan diperlukan, namun pengeluaran-pengeluaran ini biasanya relative kecil sehingga tidak diperhitungkan sebagai penilaian untuk mencatat sumbangan aktiva tersebut.

Aktiva yang diperoleh melalui sumbangan melalui sumbangan seharusnya dinilai dan dicatat sebesar nilai pasar wajarnya. Perolehan aktiva lewat sumbangan ini akan diakui sebagai pendapatan atau keuntungan dalam periode dimana sumbangan aktiva tersebut diterima. Penyusutan atas aktiva yang diperoleh lewat sumbangan akan dicatat dengan cara yang sama seperti penyusutan aktiva lainnya, dimana nilai yang ditetapkan atas aktiva akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan beban penyusutan.

Perolehan aset tetap melalui donasi (sumbangan) dalam Hery dan Widyawati Lekok (2015: 18) sedikit berbeda dalam Syukur (2015: 251-252) Unsur utama harga perolehan aktiva tetap yang diperoleh dari hibah atau pemberian ditetapkan berdasarkan taksiran harga pasar aktiva sejenis pada saat diperoleh sebagai hibah. Namun apabila taksiran harga pasarnya tidak dapat ditentukan, maka penentuan harga perolehannya dapat didasarkan pada penilaian ekspertis atau kebijakan pimpinan perusahaan. Sebesar nilai yang ditetapkan sebagai harga perolehan aktiva tersebut dikredit pada perkiraan "Modal Sumbangan". (Syukur, 2015: 251-252)

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No, 16 Tahun 2015 "Paragraf 28, jumlah tercatat aset tetap dapat dikurangi

dengan hibah pemerintah sesuai dengan PSAK 61: Akuntansi Hibah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah”.

5. Pengukuran Setelah Pengakuan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Tahun 2015 “Paragraf 29, entitas milih model biaya di paragraph 30 atau model revaluasi di paragraph 31 sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelas yang sama”.

Paragraf 37, suatu kelas aset tetap adalah pengelompokkan aset-aset yang memiliki sifat dan keuangan yang serupa dalam operasi entitas. Berikut adalah contoh dari kelas tersendiri: Tanah; Tanah dan bangunan; Mesin; Kapal; Pesawat udara; Kendaraan bermotor; Perabotan; dan Peralatan kantor.

a. Model Biaya (*Cost Model*)

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Tahun 2015 “Paragraf 30, setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai”.

Paragraf 06, “Rugi penurunan nilai adalah jumlah yang merupakan selisih lebih jumlah tercatat aset atas jumlah terpulihkannya”. Jumlah tercatat adalah jumlah suatu aset diakui setelah dikurangi akumulasi dan rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih

tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya.

b. Model Revaluasi (*Revaluation Model*)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Tahun 2015 Paragraf 31, Setelah pengakuan sebagai aset, suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Paragraf 06, “nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. (Lihat PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar)”.

Paragraf 35, jika aset tetap direvaluasi penyusutan pada tanggal revaluasi diperlakukan dengan salah satu cara berikut ini:

- 1) Disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasinya. Metode ini sering digunakan jika aset direvaluasi dengan cara member indeks untuk

menentukan biaya penggantinya. (Lihat PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar).

- 2) Dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasi dari aset tersebut. Metode ini sering digunakan untuk bangunan.

c. Penyusutan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 per efektif 1 Januari 2015 Paragraf 06, “penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan dari aset selama umur manfaatnya”. Jumlah tersusutkan adalah biaya perolehan aset, atau jumlah lain yang merupakan pengganti biaya perolehan, dikurangi nilai residunya.

Depresiasi atau penyusutan merupakan suatu prosedur akuntansi yang bertujuan untuk mengalokasikan bagian dari harga perolehan suatu aktiva tetap berwujud sebagai beban dalam perhitungan laba rugi selama masa manfaat yang ditetapkan secara sistematis dan rasional. Depresiasi dalam pengertian akuntansi tidak dimaksudkan sebagai pembentukan suatu cadangan untuk mengganti aktiva tersebut setelah habis masa manfaatnya seperti pada pemahaman ekonomi perusahaan. (Syakur, 2015: 253)

- 1) Faktor yang diperlakukan dalam menghitung depresiasi (penyusutan)
 - a) Biaya perolehan (*cost*)

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Penyusutan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Tahun 2015 Paragraf 06, Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan pada aset ketika pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain, contohnya PSAK 53: Pembayaran Berbasis Saham.

b) Umum manfaat (*useful life*)

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Tahun 2015 Paragraf 06, umur manfaat adalah:

- (1) Periode aset diperkirakan dapat digunakan oleh entitas; atau
- (2) Jumlah produksi atau unit serupa dari aset yang diperkirakan akan diperoleh dari aset entitas.

Paragraf 56, manfaat ekonomi masa depan suatu aset dipakai oleh entitas terutama melalui penggunaannya. Akan tetapi, beberapa faktor lain seperti keusangan teknis, keusangan komersial, dan keausan selama aset tidak terpakai, sering mengakibatkan menurunnya manfaat ekonomik yang dapat diperoleh dari aset tersebut. Sebagai konsekuensinya, seluruh faktor berikut ini diperhitungkan dalam menentukan umur manfaat dari suatu aset:

- (1) Perkiraan daya pakai. Daya pakai dinilai dengan merujuk pada kapasitas atau *output* fisik dari aset;
 - (2) Perkiraan tingkat keausan fisik, yang bergantung pada faktor pengoprasian aset seperti jumlah penggiliran penggunaan aset dan program perbaikan dan pemeliharannya, serta perawatan dan pemeliharaan ketika aset tidak digunakan
 - (3) Keusangan teknis atau keusangan komersial yang timbul dari perubahan atau peningkatan produksi, atau dari perubahan permintaan pasar atas produk atau *output* jasa yang dihasilkan oleh aset; dan
 - (4) Pembatasan hukum atau yang serupa atas penggunaan aset, seperti berakhirnya waktu penggunaan terkait dengan sewa.
- c) Nilai Sisa (*salvage value*)

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Tahun 2015 Paragraf 06, “Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, jika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diperkirakan pada akhir umur manfaatnya”.

2) Metode penyusutan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Tahun 2015 Paragraf 60, “metode penyusutan yang digunakan mencerminkan pola pemakaian manfaat ekonomik masa depan aset yang diharapkan oleh entitas”.

Paragraf 62, berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah tersusutkan dari aset secara sistematis selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Metode penyusutan garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Metode unut produksi menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diperkirakan dari aset, Entitas memilih metode yang paling mencerminkan pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomi masa depan aset. Metode tersebut diterapkan secara konsisten dari period eke priode. Kecuali terdapat perubahan dalam pola pemakaian manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan aset tersebut.

Dalam pulungan, dkk. (2013: 168-171) Metode Penyusutan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

(1) Metode garis lurus

Metode garis lurus adalah metode depresiasi yang paling sederhana dan banyak digunakan. Berdasarkan metode ini, Biaya perolehan aset akan dialokasikan sama ke dalam setiap periode penggunaan aset tersebut.

(2) Metode unit produksi

Menentukan depresiasi dengan menggunakan unit produksi mengharuskan umur manfaat tidak diukur dengan satuan tetapi dengan menggunakan estimasi jumlah unit produksi, seperti jam produksi, jumlah kilometer, dan unit produksi lainnya.

Depresiasi dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai sisa} = \text{Depresiasi Unit Produksi}$$

Total Estimasi Unit Produksi

$$\text{Unit Produksi} \times \text{Depresiasi per Unit Produksi} = \text{Biaya Depresiasi}$$

(3) Metode saldo menurun

Metode saldo menurun menghasilkan depresiasi yang semakin kecil setiap tahunnya. Dengan kata lain depresiasi pada periode awal umur manfaat suatu aset lebih besar dari pada periode – periode selanjutnya. Tidak seperti metode depresiasi lainnya, metode saldo menurun tidak

memperhitungkan nilai sisa dalam menghitung depresiasi setiap tahun. Depresiasi akan selesai dihitung pada saat nilai tercatat suatu aset sama dengan nilai sisanya.

d. Penurunan Nilai

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Tahun 2015 Paragraf 63, dalam menentukan apakah aset tetap mengalami penurunan nilai, entitas menerapkan PSAK 48: Penurunan Nilai Aset. PSAK 48 menjelaskan bagaimana entitas menelaah jumlah tercatat asetnya, bagaimana menentukan jumlah terpulihkan dari aset, dan kapan mengakui atau membalik rugi penurunan nilai.

Dalam Martani, ddk (2014: 288-289). Entitas harus melakukan *review* setiap akhir periode untuk menentukan apakah terjadi penurunan nilai aset atas tetapnya. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mengalami penurunan nilai, entitas mengacu ke PSAK 48 (revisi 2009) Penurunan Nilai Aset. Menurut PSAK 48, suatu aset disebut mengalami penurunan nilai jika nilai tercatatnya lebih besar dibandingkan nilai terpulihkan (*recoverable amount*). Nilai terpulihkan adalah nilai tertinggi di antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual (*fair value less cost to sell*) dan nilai pakai (*value in use*).

Nilai wajar dikurangi biaya penjualan adalah jumlah yang dapat dihasilkan dari penjualan suatu aset atau unit penghasilan kas dalam transaksi antara pihak – pihak yang mengerti dan berkehendak bebas

tanpa tekanan, dikurangi biaya pelepasan aset. Sedangkan nilai pakai adalah nilai kini dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima.

Sesuai ketentuan dalam PSAK 48, entitas harus menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai pada setiap akhir periode pelapora. Jika terdapat indikasi, maka entitas harus mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Namun, jika tidak terdapat indikasi, maka entitas tidak perlu mengestimasi jumlah terpulihkan.

Dalam mempertimbangkan ada tidaknya indikasi penurunan nilai atas aset tetap, maka entitas harus mempertimbangkan dari sumber eksternal dan sumber internal. Informasi dari sumber – sumber eksternal adalah sebagai berikut:

- 1) Selama periode tersebut, nilai pasar aset telah turun secara signifikan lebih dari yang diharapkan sebagai akibat dari berjalannya waktu atau pemakaian normal.
- 2) Perubahan signifikan dalam hal teknologi, pasar, ekonomi atau lingkup hukum tempat entitas beroperasi atau di pasar tempat aset dikaryakan, yang berdampak merugikan terhadap entitas, telah terjadi selama periode tersebut, atau akan terjadi dalam waktu dekat.
- 3) Suku bunga pasar atau tingkat imbalan pasar dari investasi telah meningkat selama periode tersebut, dan kenaikan tersebut mungkin akan memengaruhi tingkat diskonto yang digunakan dalam

menghitung nilai pakai aset dan menurunkan nilai terpulihkan aset secara material.

- 4) Jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya.

Sedangkan informasi dari sumber – sumber internal dapat berupa sebagai berikut:

- 1) Terdapat bukti mengenai atau kerusakan fisik aset.
- 2) Telah terjadi atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan signifikan yang berdampak merugikan sehubungan dengan seberapa jauh, atau cara, suatu aset digunakan atau diharapkan akan digunakan. Perubahan – perubahan ini termasuk dalam hal aset menjadi tidak digunakan, rencana untuk menghentikan atau restrukturisasi operasi yang di dalamnya suatu aset digunakan, rencana untuk melepas aset sebelum tanggal yang diharapkan sebelumnya, dan penilaian ulang masa manfaat aset dari tidak terbatas menjadi terbatas.
- 3) Terdapat bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk, atau akan lebih buruk, dari yang diharapkan

e. Kompensasi untuk Penurunan Nilai

Menurut Ikatan Akuntans Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Tahun 2015 Paragraf 65, “kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami

penurunan nilai, hilang atau dihentikan dimasukkan dalam laba rugi ketika kompensasi menjadi piutang”.

Paragraf 66, penurunan nilai atau kerugian aset tetap, klaim atas atau pembayaran kompensasi dari pihak ketiga, dan setiap pembelalian atau konstruksi selanjutnya dari penggantian aset adalah peristiwa ekonomik terpisah dan dicatat terpisah sebagai berikut:

- 1) Penurunan nilai aset tetap diakui sesuai dengan PSAK 48: Penurunan Nilai Aset;
- 2) Penghentian penggunaan aset tetap yang dihentikan atau dilepaskan ditentukan sesuai dengan pernyataan ini;
- 3) Kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan dimasukkan dalam laba rugi pula pada saat kompensasi menjadi piutang; dan
- 4) Biaya perolehan aset tetap yang diperbaiki, dibeli, atau dikonstruksi sebagai penggantian ditentukan sesuai dengan Pernyataan ini.

f. Pengeluaran yang Terjadi Selama Umur Manfaat

Dalam Pulungan, dkk (2013: 171 – 173), Aset tetap dipergunakan oleh perusahaan sepanjang umur manfaatnya. Sepanjang umur manfaat tersebut, perusahaan kerap kali mengeluarkan berbagai biaya baik untuk memelihara, mempertahankan, memperbaiki, meningkatkan kualitas dan sebagainya. Dalam akuntansi, pengeluaran yang terkait aset tetap selama umur manfaatnya diklasifikasikan menjadi dua yakni:

- 1) Pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*)

Sering juga disebut pengeluaran operasi (*operating expense*). Pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran biaya-biaya yang ditujukan untuk mempertahankan efektivitas kinerja aset tetap. Pengeluaran ini meliputi biaya-biaya pemeliharaan (*maintenance*) yang dikeluarkan perusahaan agar aset tetap dapat digunakan secara normal. Misalkan mesin yang digunakan untuk memproduksi barang perlu diservis, dicek dan diberi pelumas secara berkala. Mobil yang digunakan juga perlu diservis secara berkala dan anti oli. Bangunan juga memerlukan pemeliharaan misalkan mengecek apakah ada kebocoran dan dilakukan pengecatan tembok secara berkala. Pengeluaran – pengeluaran tersebut diperlukan sebagai beban periodik.

2) Pengeluaran modal (*capital expenditure*)

Pengeluaran modal adalah biaya – biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk meningkatkan (*improve*) efektivitas kinerja aset tetap. Peningkatan tersebut dapat berupa peningkatan kapasitas produksi, memperpanjang umur manfaat dan mempercepat kinerja. Contoh pengeluaran modal adalah agar kinerja mobil lebih lebih baik dilakukan turun mesin. Mesin pabrik juga memerlukan perbaikan besar – besaran secara berkala (*overhaul*) untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mempercepat proses produksi. Pengeluaran semacam ini harus dikapitalisasi sebagai nilai perolehan aset tetap (*cost*). Konsekuensinya adalah nilai tercatat aset tetap akan meningkat dan harus dialokasikan

sepanjang sisa umur manfaatnya melalui depresiasi. Dalam kasus lainnya, umur manfaatnya aset tetap dapat juga menjadi lebih lama sehingga depreciasi perlu disesuaikan dengan umur manfaatnya yang terkini.

6. Penghentian Pengakuan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 16 Tahun 2015 “paragraf 67, jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya :

- (a) Pada saat pelepasan; atau
- (b) Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya”.

Paragraph 68, Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi ketika aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya (kecuali PSAK 30: Sewa mensyaratkan perlakuan yang berbeda dalam transaksi jual dan sewa-balik). Keuntungan tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan.

Paragraph 71, “keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya”.

Dalam pulungan, dkk. (2013;173-174) apabila aset tetap tidak dipergunakan lagi, maka aset tersebut dapat didisposisikan dengan cara dibuang atau dihibahkan, dijual, ataupun ditukar dengan aset yang lain. Pada saat perusahaan memutuskan untuk mendisposisi suatu aset tetap,

maka perusahaan akan mendebet akumulasi depresiasi dan mengkredit aset tetap tersebut. Meskipun nilai tercatat aset tetap telah habis (saldonya nol) selama aset tersebut belum didisposisi maka pencatatannya tidak boleh dihilangkan dalam laporan keuangan.

7. Penyajian

Menurut PSAK No.1 dalam laporan keuangan, penyajian aset tetap akan terlihat dalam neraca. Neraca merupakan suatu daftar yang menggambarkan komposisi harta, kewajiban dan modal pada suatu periode tertentu. Ernawati (2014) menyatakan bahwa dalam neraca, aset tetap dicatat sebesar nilai bukunya, yaitu harga perolehan aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi depresiasi aset tetap.

8. Pengungkapan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Tahun 2015 Paragraph 73, laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelas aset tetap:

- (a) Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto;
- (b) Metode penyusutan yang digunakan;
- (c) Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- (d) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan

- (e) Rekonsiliasi jumlah tercatat awal dan akhir periode yang menunjukkan :
- (i) Penambahan;
 - (ii) Aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang dihentikan dan pelepasan lain;
 - (iii) Perolehan melalui kombinasi bisnis;
 - (iv) Peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi sesuai dengan paragra 31,39, dan 40 serta dari rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 48: Penurunan Nilai Aset;
 - (v) Rugi penurunan Nilai yang diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 48;
 - (vi) Pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 48;
 - (vii) Penyusutan
 - (viii) Selisih Kurs Neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda, termasuk penjabaran dan kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang pelaporan dari entitas pelaporan; dan
 - (ix) Perubahan lain.

Paragraf 74, laporan keuangan juga mengungkapkan:

- (a) Keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijamin untuk liabilitas;
- (b) Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam konstruksi;
- (c) Jumlah komitmen kontraktual untuk memperoleh aset tetap; dan
- (d) Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan yang termasuk dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Paragraf 75, pemilihan metode penyusutan dan estimasi umur manfaat aset adalah hal yang memerlukan pertimbangan. Oleh karena itu, pengungkapan metode yang digunakan dan estimasi umur manfaat atau tarif penyusutan menyediakan informasi bagi pengguna laporan keuangan dalam mengkaji kebijakan yang dipilih manajemen dan memungkinkan perbandingan dengan estimasi lain. Untuk alasan yang serupa, juga perlu diungkapkan:

- (a) Penyusutan, apakah diakui dalam laba rugi atau diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset lain, selama satu periode; dan
- (b) Akumulasi Penyusutan pada akhir periode.

Paragraf 76, sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan estimasi mengungkapkan sifat dan dampak perubahan estimasi akuntansi yang berdampak material pada periode berjalan atau diperkirakan berdampak material pada periode berikutnya.

Untuk aset tetap, pengungkapan tersebut dapat timbul dalam perubahan estimasi dalam:

- (a) Nilai Residu
- (b) Estimasi biaya pembongkaran, pemindahan atau restorasi aset tetap;
- (c) Umur manfaat; dan
- (d) Metode penyusutan.

Paragraf 77, jika aset tetap disajikan pada jumlah revaluasian, hal berikut diungkapkan sebagai tambahan pengungkapan yang disyaratkan oleh PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar:

- (a) Tanggal efektif revaluasi;
- (b) Apakah melibatkan penilai independen;
- (c) Dikosongkan;
- (d) Untuk setiap kelas aset tetap yang direvaluasi, jumlah tercatat aset seandainya aset tersebut dicatat dengan metode biaya; dan
- (e) Surplus revaluasi, yang mengindikasikan perubahan selama periode dan setiap pembatasan distribusi kepada pemegang saham.

Paragraf 78, sesuai dengan PSAK 48: Penurunan nilai Aset entitas mengungkapkan informasi penurunan nilai aset tetap sebagai tambahan informasi yang disyaratkan di paragraph 73 (e) (iv) – (vi). Paragraf 79, Informasi berikut mungkin relevan dengan kebutuhan pengguna laporan keuangan:

- (a) Jumlah tercatat aset tetap yang dipakai sementara;
- (b) Jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dengan masih digunakan;

- (c) Jumlah tercatat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58: Aset tidak lancar yang dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang dihentikan: dan
- (d) Jika model biaya digunakan, nilai wajar aset tetap ketika berbeda secara material dengan jumlah tercatat.

Oleh karena itu, entitas dianjurkan mengungkapkan jumlah tersebut.

9. Kebijakan Akuntansi

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 25 Tahun 2015 “paragraf 05, berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini: Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, pengaturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusutan dan penyajian laporan keuangan”.

a. Pemilihan dan penerapan Kebijakan Akuntansi

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 25 Tahun 2015 “paragraf 07, Ketika suatu PSAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lain, kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pos tersebut menggunakan PSAK tersebut”.

Paragraf 08, SAK menentukan kebijakn akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi relevan dan andal atas transaksi, peristiwa dan kondisi lain. Kebijakan akuntansi

tersebut tidak perlu diterapkan ketika dampak penerapannya tidak material. Akan tetapi, adalah tidak tepat untuk membuat, atau membiarkan ketidaktepatan, penyimpangan dari SAK untuk mencapai suatu penyajian tertentu atas posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas.

Paragraf 09, SAK dilengkapi dengan metode pedoman untuk membantu entitas dalam menerapkan persyaratan dalam SAK. Pedoman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SAK bersifat wajib diterapkan. Sementara pedoman yang bukan bagian tidak terpisahkan dari SAK tidak berisi pengaturan untuk laporan Keuangan.

b. Konsistensi kebijakan Akuntansi

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 25 Tahun 2015 Paragraf 13, entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang serupa, kecuali suatu PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda adalah hal yang tepat. Jika suatu PSAK mengatur atau mengizinkan pengelompokan tersebut, maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok.

c. Perubahan kebijakan akuntansi

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 25 Tahun 2015 Paragraf 13, entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang serupa, kecuali suatu PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda adalah hal yang tepat. Jika suatu PSAK mengatur atau mengizinkan pengelompokan tersebut, maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok.

Perubahan kebijakan akuntansi

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 25 Tahun 2015 Paragraf 14, entitas mengubah sesuatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut;

- 1) Disyaratkan oleh suatu PSAK; atau
- 2) Menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas.

d. Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 25 Tahun 2015 Paragraf 19, Bergantung pada paragraf 23:

- 1) Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAK tersebut, jika ada; dan
- 2) Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAK yang tidak mengatur ketentuan transaksi untuk perubahan tersebut, atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif.

e. Penerapan Retrospektif

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 25 Tahun 2015 Paragraf 22, bergantung pada paragraph 23, ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif sesuai dengan paragraf 19 (a) atau 19 (b), maka entitas menyesuaikan saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal dan jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah – olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya.

f. Keterbatasan Penerapan Retrospektif

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 25 Tahun 2015 Paragraf 23, jika penerapan retrospektif disyaratkan oleh paragraf 19 (a) atau 19 (b), maka perubahan kebijakan akuntansi ditetapkan secara retrospektif kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif perubahan tersebut.

g. Pengungkapan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 25 Tahun 2015 Paragraf 23, jika penerapan awal suatu PSAK memiliki dampak pada periode berjalan atau periode sebelumnya, akan memiliki dampak terhadap periode tersebut kecuali tidak praktis untuk menentukan jumlah penyesuaian, atau mungkin memiliki dampak pada periode mendatang, maka entitas mengungkapkan:

- 1) Judul PSAK;
- 2) Bahwa perubahan kebijakan akuntansi dilakukan sesuai dengan ketentuan transisinya, ketika dapat diterapkan;
- 3) Sifat dari perubahan kebijakan akuntansi
- 4) Penjelasan ketentuan transisi, ketika dapat diterapkan;
- 5) Ketentuan transisi yang mungkin memiliki dampak pada periode mendatang, ketika dapat diterapkan;
- 6) Untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya disajikan, sepanjang praktis, jumlah penyesuaian:
 - (a) Untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh ; dan
 - (b) Laba per saham dasar dan dilusian, jika PSAK 56 : Laba Per Saham diterapkan atas entitas;
- 7) Jumlah penyesuaian terkait dengan periode-periode sebelum periode tersebut disajikan, sepanjang praktis; dan
- 8) Jika penerapan retrospektif disyaratkan oleh paragraph 19 (a) dan 19 (b) tidak praktis untuk suatu periode tersebut disajikan,

keadaan yang mendorong keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan mulai kapan perubahan kebijakan akuntansi diterapkan, laporan keuangan periode selanjutnya tidak perlu mengulang pengungkapan ini.

B. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1. Daftar Penelitian Sebelumnya

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel x	Variabel y	Hasil Penelitian
1	Agnes Fanda Salainti (2013)	Evaluasi Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulutenggo Area Manado	Evaluasi, penerapan,	Akuntansi, aktiva tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan menerapkan harga perolehan (historical cost) sebagai dasar dalam mengukur aset tetapnya. 2. Pengeluaran setelah pengeluaran perolehan aset tetap, meliputi pengeluaran-pengeluaran rutin selama penggunaan aset tetap pada perusahaan seperti rehabilitasi, renovasi, restorasi, dan reparasi menurut standar akuntansi keuangan harus diperlakukan sebagai pengeluaran modal. 3. Semua aset tetap pada perusahaan telah memenuhi syarat untuk disusutkan. 4. Metode penyusutan terhadap seluruh jenis aset tetapnya telah dilaksanakan secara konsisten dan tidak menyimpang dari standar akuntansi keuangan yang berlaku.
2	Erda Yuliani (2004)	Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No. 16 Pada CV. Metalindo Jaya Bintang.	Aset tetap, Pengakuan Aset Tetap,	Penyusutan Aset Tetap, Laporan Keuangan	<p>Perusahaan tersebut belum secara keseluruhan menetapkan PSAK No. 16 dalam mengelola aset tetapnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan dalam pengukuran biaya perolehan aset tetap belum sesuai PSAK,

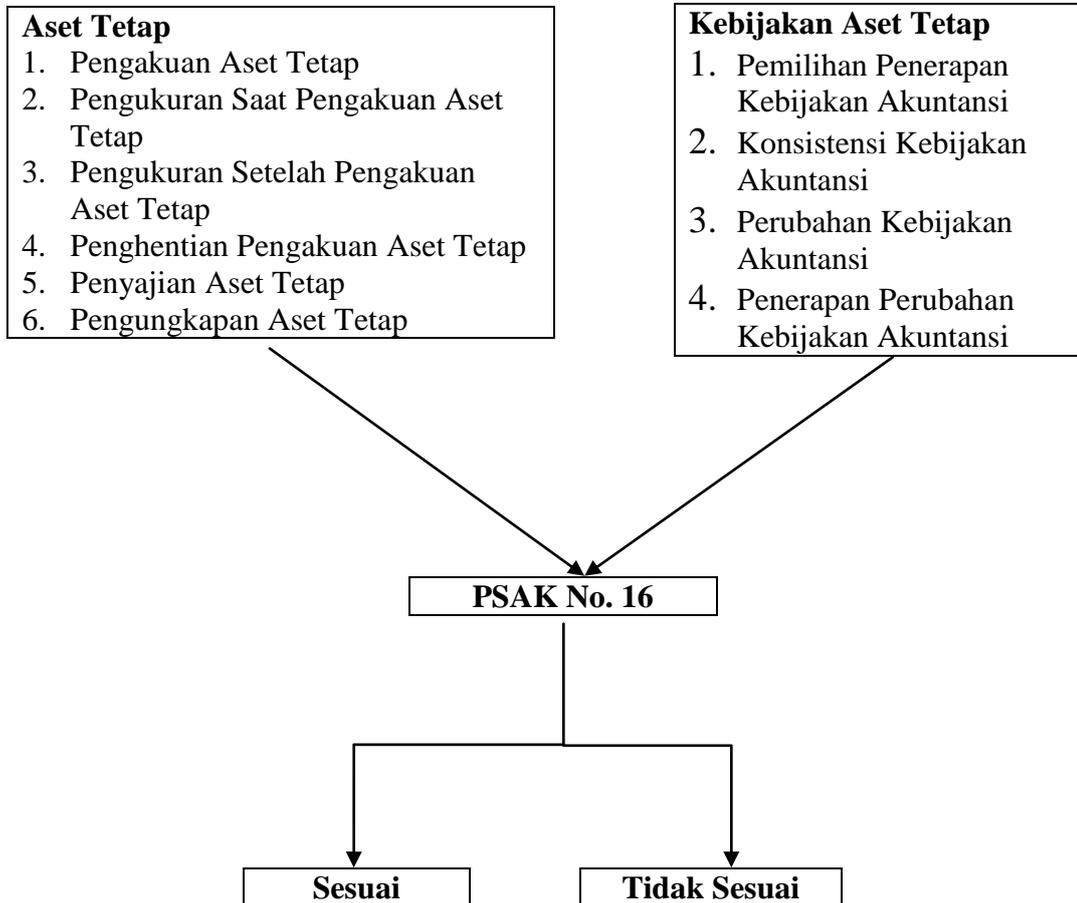
No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel x	Variabel y	Hasil Penelitian
					<p>2. Perusahaan tidak melakukan pemisahan terhadap beban penyusutan dari setiap aset tetap,</p> <p>3. Perusahaan masih mencatat aset tetap yang telah dihentikan kedalam daftar aset tetap yang dimiliki perusahaan, serta tidak mengelompokkan aset tetap sesuai dengan kelompoknya.</p>
3	Luka MLAD INEO & Nenad VUDR IC (2012)	<i>Tangible Fixed Assets Accounting (2nd Redete 2012 Conference International Scientific Conference</i>	<i>Fixed Assets,</i>	<i>Tangible fixed asset, financial statement</i>	<i>When undergoing the revaluation of tangible fixed assets the management can choose the Cost Model or the Revaluation Model as the value adjustment model of tangible and intangible fixed assets within the accounting policies. In this paper the authors have tried to show the models that can be used in the reduction in value of tangible fixed assets and its impact on the operating result of the company. The value of revaluated tangible fixed assets registered in financial reports is closer to its real value and as such gives more useful information. In spite of that fact, half of companies that use Croatian Financial Reporting Standards use the Cost Model. Considering the intended use of the tangible fixed assets there are different ways of accounting treatment of revaluation. In case of increase in value of the assets, the difference between book and fair value is shown as income in the profit and loss statement or as a revaluation surplus. Entrepreneurs that are obliged to follow IFRS evident the revaluation surplus in the other comprehensive profit statement while those that are obliged to follow CFRS evident it in the notes. Taking into consideration those regulations, it seems incredible that none of the companies in the survey reclassify tangible fixed assets.</i>

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel x	Variabel y	Hasil Penelitian
4	P. Svoboda (2007)	<i>Valuation of Tangible Fixed Assets Pursuant to The Czech Accounting Law and International Accounting Standards</i>	<i>Fixed Assets,</i>	<i>Tangible fixed asset, IFRS</i>	<i>The report states the basic differences in the sphere of tangible fixed assets, in particular in terms of their definition, valuation at the moment of acquisition and as at the balance sheet date, and possibilities of value reduction as per the Czech legal regulations and the IAS/IFRS and the US GAAP standards. The comparison of the legal regulations was supplemented with an analysis of the financial reports from the Czech companies preparing the financial statements in conformity with the above-specified standards. They proved a significant impact of the differences on the economic result and balance sheet sum. The companies preparing the financial statements in conformity with the standards apply an approach of transformation of the financial statements prepared pursuant to the Czech regulation by modification via a transmission bridge or by keeping double bookkeeping. The first approach, however, does not enable the application of all possibilities given by the standards, for example the component depreciation. It proves evident that there is a slight rapprochement of the IAS/IFRS and the US GAAP standards, applied in particular by the major companies to prepare the financial statements. Harmonization for small-sized and medium-sized companies is necessary, too. The International Accounting Standards Board (IASB) published the first drafts of standards for small-sized and medium-sized entities – SME. As for tangible fixed assets, the draft is practically compatible with the “large” IAS/IFRS.</i>

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel x	Variabel y	Hasil Penelitian
5	Veronika Debra Koapaha, Jullie J. Sondakh, dan Rudy J. Pusung	Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berdasarkan PSAK No. 16 pada RSUP Prof. DR.R.D. Kandou Manado	Aktiva tetap, PSAK No.16	Penerapan PSAK No.16	<ol style="list-style-type: none"> 1. RSUP. Prof. Dr.R.D.Kandou Manado dalam hal melaksanakan kegiatan akuntansinya berpedoman pada Kebijakan Akuntansi RSUP Prof Kandou yang pada prinsipnya sudah mendekati Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16. Penilaian/pengukuran aktiva tetap pada Aktiva Tetap Perusahaan dilakukan sesuai kebijakan perusahaan dalam hal ini pihak rumah sakit dan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan PSAK N. 16. 2. Pengakuan aktiva tetap pada RSUP Prof Kandou telah sesuai dengan PSAK No. 16. RSUP Prof Kandou melakukan pengeluaran-pengeluaran atas aktiva tetap yaitu pengeluaran kas dan pengeluaran pendapatan misalnya aktiva yang sudah melewati masa manfaatnya dihapuskan atau dihibahkan. Dan prinsip ini tidak menyimpang dari PSAK No. 16. 3. RSUP Prof Kandou melakukan penyusutan aktiva tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan. Perusahaan memilih metode saldo menurun, kecuali tanah dan menghitung penyusutan semua aktiva dengan satu metode saja. Hal ini tidak dibenarkan dalam Standar Akuntansi Keuangan. RSUP Prof Kandou melakukan penghentian dan pelepasan aktiva tetap dengan cara dihapuskan, dihibahkan, maupun dimusnahkan. Dalam hal ini sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16.

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

Metode Penelitian

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah Penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, dalam Moleong, (2012:3), “Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan suatu proses kegiatan yang didasarkan pada apa yang terjadi di lapangan sebagai bahan kajian untuk menemukan kelemahan dan kekurangannya sehingga dapat ditentukan upaya perbaikannya; menganalisis suatu fakta, gejala, dan peristiwa yang terjadi di lapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan.

2. Waktu Penelitian

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Aprl	Mei	Jun	Juli	Des	Jan	Feb	Mrt	Aprl	Mei	Jun	Juli
1	Pengajuan Judul	■											
2	Penyusunan Proposal		■	■									
3	Perbaikan Proposal				■	■							
4	ACC Proposal						■						
5	Seminar Proposal								■				
6	Riset												
7	Penyusunan Data									■			
8	Analisis Data									■			
9	Bimbingan Skripsi										■	■	
10	Sidang Meja Hijau												■

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2019

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. “Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data” (Sugiyono, 2009:402) Dalam hal ini, data primer yang digunakan peneliti diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan pegawai bagian akuntansi yang khusus menangani aset tetap perusahaan. “Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat

dokumen” (Sugiyono, 2009: 402) Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan peneliti diperoleh melalui Laporan Keuangan periode 2012-2017, Lampiran atas Laporan Keuangan periode 2012-2017 dan Buku Kebijakan Akuntansi.

2. Sumber Data

Sumber data berasal dari data perusahaan yang terdiri dari :

- a. Gambaran Umum PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan.
- b. Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan.
- c. Laporan Keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan per 31 Desember 2017.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara dan observasi.

1. Studi Dokumentasi

“Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan

wawancara dalam penelitian kualitatif” (Sugiyono, 2009: 422) Studi dokumentasi diperoleh melalui Laporan Keuangan periode 2012-2017, Lampiran atas Laporan Keuangan periode 2012-2017 dan Buku Kebijakan Akuntansi.

2. Wawancara

“Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)” (Nazir, 2009: 193) Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur (*structured interview*). “Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan” (Sugiyono, 2009: 412)

3. Observasi

Menurut Sanusi (2011:111) observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Observasi dilakukan pada proses pencatatan transaksi pihak manajemen PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan.

E. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini, maka data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif pendekatan deskriptif dengan proses sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menganalisa data yang telah diperoleh yang meliputi Laporan Keuangan, Lampiran atas Laporan Keuangan, dan Buku Kebijakan Akuntansi.
2. Melakukan wawancara kepada pegawai bagian akuntansi pada PT PLN Area Medan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi aset tetap yaitu dari proses pengakuan, pengukuran setelah pengakuan, penghentian pengakuan, penyajian pada laporan keuangan, serta pengungkapan aset tetap pada catatan atas laporan keuangan yang diterapkan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan.
3. Mengklasifikasikan data yang diperlukan untuk dibandingkan dengan kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap yang berpedoman pada PSAK No. 16 Tahun 2015
4. Metode analisis data dari data yang diperoleh kemudian dikaji berdasarkan PSAK No. 16 Tahun 2015 dan analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan kuantitatif (jumlah) akan tetapi dalam bentuk pernyataan dan uraian dan selanjutnya disusun secara sistematis dalam skripsi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah Perkembangan Perusahaan

Kelistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke 19, pada saat beberapa perusahaan belanda antara lain pabrik gula dan pabrik the mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk kemanfaatan umum mulai ada saat perusahaan swasta belanda yaitu *NV NIGN* yang semula bergerak dibidang gas memperluas usahanya dibidang listrik untuk kemanfaatan umum. Pada tahun 1927 Pemerintah Belanda membentuk *Lands Waterkracht Bedrijyen (LB)* yaitu perusahaan listrik yang mengelola PLTA Plengan, PLTA Lamajan, PLTA Bengkok Dago, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonsea Lama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta. Selain itu di beberapa Kota praja perusahaan perusahaan listrik di kota praja.

Setelah berhasil merebut perusahaan listrik dan gas dari tangan Jepang, kemudian pada bulan September 1945. Delegasi dari Buruh/Pegawai listrik dan gas yang diketahui oleh Kobarjih menghadap Pimpinan KNI Pusat yang waktu itu diketahui oleh Mr. Kasman Singodimejo untuk melaporkan hasil pimpinan KPNI pusat menghadap presiden Soekarno, untuk meyerahkan perusahaan-perusahaan listrik dan gas kepada Pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan tersebut diterima oleh presiden Soekarno dan kemudian dengan Penetapan Pemerintah 1945 No. 1 tanggal 27 Oktober 1945 maka dibentuklah jawatan listrik dan gas dibawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Dengan adanya Agresi Militer Belanda I dan II sebagian besar perusahaan-perusahaan dikuasai kembali oleh Pemerintah Belanda atau pemiliknya semula. Selanjutnya kristalisasi dari semangat tanggal 03 Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik milik bangsa asing di Indonesia, jika waktu konsesinya habis.

Sejarah ketenaga listrikan di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan pasang surutnya bangsa. Tanggal 27 Oktober 1945 kemudian dikenal sebagai hari Listrik dan gas, hari tersebut telah diperingati untuk pertama kalinya pada tanggal 27 Oktober 1945 bertempat di Gedung Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) Yogyakarta. Penetapan resmi pada tanggal 27 Oktober 1945 sebagai hari Listrik dan Gas berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, Nomor 20 tahun 1960. Namun kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, nomor 235/KPTS/1975 tanggal 30 september 1975 peringatan hari Listrik dan Gas yang digabung dengan hari Kebangkitan pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang jatuh pada tanggal 3 Desember. Mengingat pentingnya semangat dan nilai-nilai hari listrik, maka berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor tanggal 27 Oktober sebagai hari listrik nasional.

b. Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi Perusahaan

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang tumbuh berkembang, unggul, dan terpercaya dengan bertumpu pada posisi insani. Menjadi Perusahaan Regional setara kelas dunia yang berorientasi kepada: pelanggan, unggul dan mandiri.

2. Misi Perusahaan

Adapun misi PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara mengikuti misi dari PT PLN (Persero) Kantor pusat yaitu :

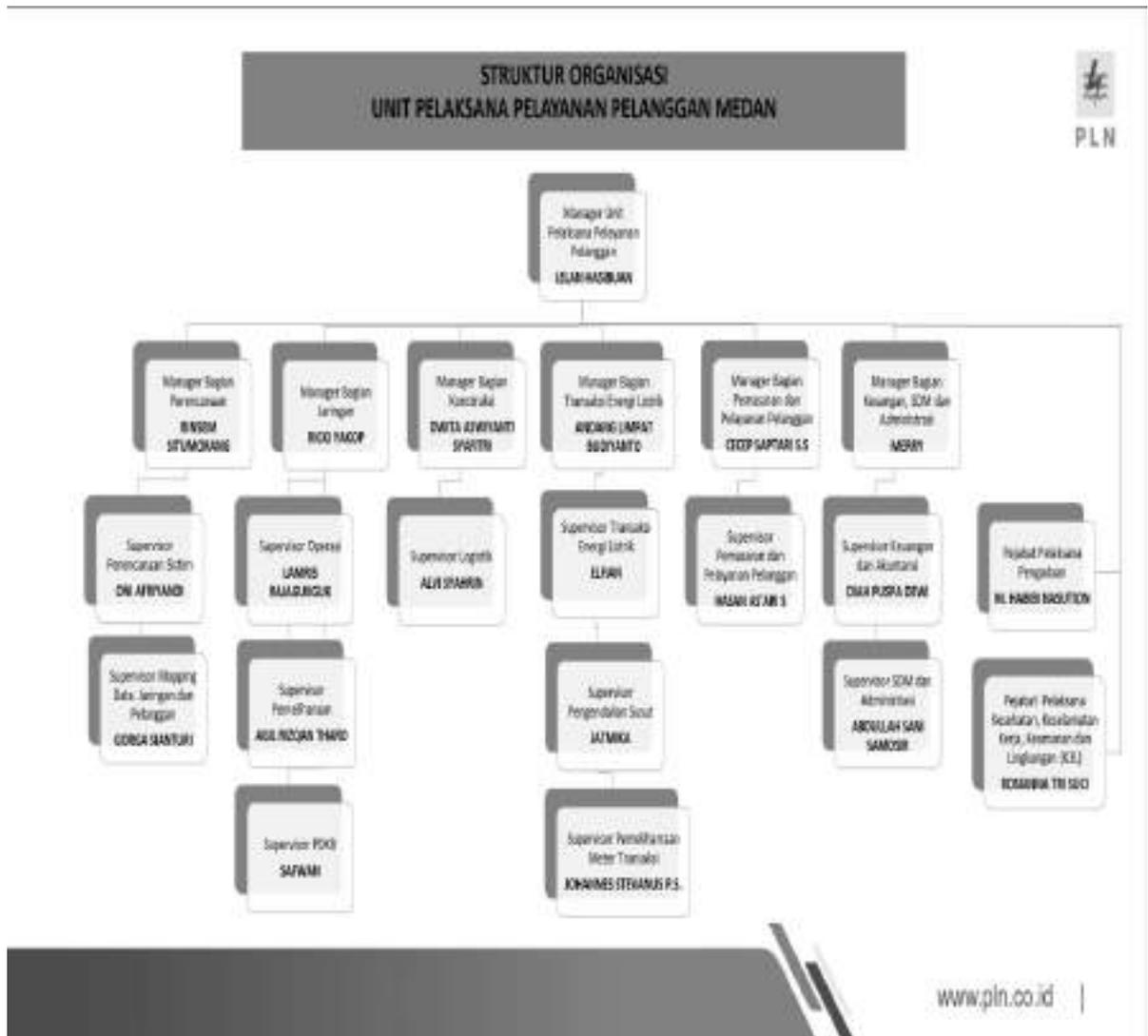
- a. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- b. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- c. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.
- d. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi disusun agar dapat menjalin suatu kerjasama berdasarkan atas hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan. Melalui badan struktur organisasi tersebut dapat diketahui hubungan antar tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang. Hal ini ditunjukkan dengan kontak dan garis yang disusun menurut kedudukan setiap orang yang ada dalam organisasi tersebut.

Bentuk struktur organisasi yang dipakai perusahaan tergantung, jumlah tenaga kerja, teknologi yang dipakai, kemampuan kepemimpinan dan besar kecilnya aktivitas perusahaan yang bersangkutan. Struktur organisasi yang digunakan PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Medan adalah struktur organisasi yang berbentuk lini (garis) dan staff, karena dalam pelaksanaannya tugas-tugas Manager Unit dibantu oleh Manager Bidang yang membawahi Sub Bidang dan dibantu oleh fungsional yang ahli dalam bidangnya. Struktur organisasi PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Medan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Area Medan



Sumber : PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan

Adapun tugas pokok dan fungsi tiap-tiap adalah sebagai berikut:

1. Bidang Perencanaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, bidang perencanaan membawahi beberapa Supervisor. Uraian fungsi pada bidang ini adalah sebagai berikut:

- Menyusun rencana Umum pengembangan Tenaga Listrik (RUPTL), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP), dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).

- b. Menyusun rencana pengembangan system ketenagalistrikan.
- c. Menyusun sistem manajemen kinerja unit-unit kerja.
- d. Menyusun metode evaluasi kelayakan investasi dan melakukan finansialnya.
- e. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan pihak lain dan penyandang dana, baik secara bilateral maupun multilateral.
- f. Menyusun, mengendalikan, dan menyiapkan SOP rencana pengembangan sistem teknologi informasi.
- g. Mengendalikan aplikasi-aplikasi teknologi informasi.
- h. Menyusun laporan manajemen.
- i. Menyusun rencana pengembangan usaha baru serta penetapan pengaturannya.

2. Bidang Jaringan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bidang jaringan membawahi beberapa Supervisor. Uraian fungsi pada bidang jaringan adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga agar pasokan tenaga listrik pada pelanggan tetap handal.
- b. Melakukan pemeliharaan gardu dan jaringan tenaga listrik.
- c. Melakukan pembangunan gardu dan jaringan yang sudah di rencanakan dari bagian perencanaan

3. Bidang Konstruksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bidang konstruksi membawahi beberapa Supervisor. Uraian fungsi pada bidang jaringan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pembangunan jaringan dan gardu distribusi

- b. Melakukan mapping aset distribusi
- c. Memastikan ketersediaan material distribusi pada periode tertentu

4. Bidang Transaksi Energi Listrik

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bidang transaksi energi listrik membawahi beberapa Supervisor. Uraian fungsi pada bidang transaksi energi listrik adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pencatatan pemakaian listrik
- b. Melakukan pemeliharaan/penggantian alat pengukur dan pembatas pada pelanggan
- c. Melakukan perhitungan pemakaian kwh meter menjadi tagihan rekening listrik
- d. Melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2tl)

5. Bidang Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bidang pemasaran dan pelayanan pelanggan membawahi beberapa Supervisor. Uraian fungsi pada bidang jaringan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan proses penyambungan baru dan tambah daya pelanggan.
- b. Membawahi penagihan rekening listrik lancar maupun piutang.
- c. Melakukan promosi program Pelayanan pelanggan
- d. Melakukan pengendalian pendapatan

6. Bidang Keuangan dan, SDM dan Administrasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bidang keuangan, SDM dan Administrasi membawahi beberapa Supervisor. Uraian fungsi pada bidang keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Mengendalikan aliran kas pendapatan dan membuat laporan rekonsiliasi keuangan.
- b. Mengendalikan anggaran investasi dan operasi serta rencana aliran kas pembiayaan.
- c. Melakukan analisa dan evaluasi laporan keuangan unit-unit serta menyusun laporan keuangan konsolidasi.
- d. Menyusun dan menganalisa kebijakan resiko dan menghapus aset.
- e. Melakukan pengelolaan keuangan.

Uraian fungsi pada bidang SDM adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan pengembangan organisasi dan mengelola pelaksanaannya.
- b. Menyusun kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan mengelola pelaksanaannya.
- c. Mengkaji usulan pengembangan organisasi dan pengembangan SDM.
- d. Menetapkan pola pengembangan SDM.
- e. Menyusun sistem dan prosedur dari semua bisnis proses yang ada serta memantau dan melakukan penyempurnaannya.
- f. Menyusun kebijakan dan pengelolaan hubungan industrial.
- g. Mengevaluasi dan mengusulkan penyempurnaan KKB.
- h. Menyusun kebijakan yang berkaitan dengan konseling pegawai.

Uraian fungsi pada bidang administrasi adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan dan mengelola fasilitas kerja, system pengamanan dan manajemen kantor.
- b. Menyusun kebijakan K3, lingkungan dan komunity development.

- c. Menyusun kebijakan Administrasi.
- d. Menyusun standart fasilitas kantor.
- e. Mengelola asset tanah dan bangunan serta sarana kerja.
- f. Mengelola kesekretariatan dan rumah tangga kantor induk

d. Istilah-istilah Aset Tetap

Beberapa istilah yang digunakan pada PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Medan adalah sebagai berikut:

1. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak termasuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

a. Aset Tetap Beroperasi

Aset tetap beroperasi adalah Aset Tetap Berwujud milik perusahaan, baik yang bergerak atau tidak bergerak, dan diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu yang digunakan baik-baik dalam kegiatan produksi maupun kegiatan penunjang operasional perusahaan.

Adapun aset tetap beroperasi yang dimiliki PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Medan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Kode Aset PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan

Aset Tetap			
Kode	Jenis	Kode	Fungsi
01	Tanah	140	Distribusi
02	Bangunan dan Kelengkapan Halaman	150	UPD
03	Bangunan saluran air	160	TUL
04	Jalan sepur samping	171	Tata usaha
05	Instalasi dan mesin	172	Gudang dan persediaan
06	Reaktor Nuklir	173	Bengkel
07	Perlengkapan penyaluran tenaga listrik	174	Laboratorium
08	Gardu induk	175	Jasa teknik
09	Saluran udara tegangan tinggi	177	Wisma dan rumah dinas
11	Kabel bawah tanah		
12	Jaringan distribusi		
13	Gardu distribusi		
14	Perlengkapan lain-lain distribusi		
15	Perlengkapan pengolah data		
16	Perlengkapan transmisi data		
17	Perlengkapan telekomunikasi		
18	Perlengkapan umum		
19	Kendaraan bermotor		
21	Material cadangan		

Sumber: PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Medan

b. Aset Tetap Tidak Beroperasi

Aset tetap tidak beroperasi adalah aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi dalam produksi maupun kegiatan penunjang operasional karena beberapa sebab, diantaranya:

a) Rusak

b) Penggantian (peningkatan keandalan, perubahan sistem, peningkatan kapasitas, ketinggalan teknologi), dan masih tercatat sebagai aset tetap karena belum diusulkan penarikan.

Aset tetap tidak beroperasi pada PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Medan dibagi menjadi tiga (3), yaitu: Aset Tetap Tidak Beroperasi

Dihapus, Aset Tetap Tidak Beroperasi Relokasi dan Aset Tetap Tidak Beroperasi Perbaikan.

2. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap yang diterapkan PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Medan

a. Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan aset tetap yang dapat di peroleh PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Medan untuk alasan keamanan atau lingkungan perusahaan. Pengakuan aset tetap semacam itu, walaupun tidak secara langsung meningkatkan manfaat ekonomis masa depan dari suatu aset tetap yang ada pada perusahaan, mungkin diperlukan bagi entitas untuk memperoleh manfaat ekonomis masa depan aset yang lain. Dalam keadaan seperti ini PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Medan melakukan pengakuan aset tetap dengan memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset, karena aset tersebut bagi perusahaan memungkinkan entitas memperoleh manfaat ekonomis masa depan yang lebih besar dari aset-aset terkait dibandingkan dengan manfaat ekonomis yang dihasilkan seandainya aset tersebut tidak diperoleh.

Pengakuan aset tetap pada PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Medan dapat dibedakan menjadi:

1. Dibeli Dalam Bentuk Siap Pakai

Aset yang dibeli dalam bentuk siap pakai atau langsung bisa digunakan, proyeksinya didasarkan pada rencana kebutuhannya. Contoh aset yang langsung bisa digunakan pada PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Medan adalah instalasi dan mesin, kendaraan, peralatan penyaluran tenaga listrik dan inventaris.

2. Aset Yang Dibangun Sendiri/ Pekerjaan dalam Pelaksanaan

Aset tetap yang dibangun sendiri dicatat sebagai Pekerjaan Dalam Pelaksanaan (PDP) ketika Aset tersebut masih dalam Tahap pembangunan/pekerjaan. Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap.

PDP dinyatakan sebesar biaya perolehan yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya *overhead* dengan proses pembangunan/ konstruksi aset yang bersangkutan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan yang dapat dikapitalisasikan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan sesuai aturan yang berlaku dan beban penyusutan aset tetap yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan.

Biaya Perolehan suatu aset yang dikonstruksikan sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana aset yang diperoleh bukan dengan konstruksi sendiri. Tiap jenis aset tetap yang dibangun sendiri/ Pekerjaan Dalam Pelaksanaan oleh perusahaan dibuatkan komponen biayanya, biaya ini terdiri dari:

- a) Biaya Material
- b) Biaya Tenaga Kerja
- c) Biaya Lainnya.

Pengakuan aset tetap yang dibangun sendiri maupun aset yang langsung bisa dipakai, di PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan dikarenakan untuk menghemat biaya, memanfaatkan fasilitas yang tidak terpakai dan keinginan untuk mendapatkan mutu yang lebih baik.

Pengakuan Aset tetap yang dibangun sendiri terdiri dari beberapa proses yaitu :

1. Pencatatan Material yang digunakan atau dipakai Nontunai

Setiap material yang dikeluarkan dari gudang harus menggunakan beberapa jenis dokumen, yaitu Surat Pemohonan Material (SPM) dari pihak pelaksan, Tata Usaha Gudang (TUG 8&9). Semua dokumen ini di PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan Sudah menggunakan dokumen elektronik melalui Aplikasi Gudang Online (AGO).

Material yang sudah di keluarkan dari gudang dengan menggunakan dokumen Tata usaha Gudang (TUG9) maka akan dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Beban Material Distribusi	Rp XXX
Material Distribusi	Rp XXX

Beban material yang dibukukan pada saat keluarnya material dari gudang menggunakan kode WBS (*Work Business Sistem*) sebagai pembeda dengan beban material lainya dimana WBS ini merupakan kode anggaran untuk isnvestasi yang dapat di asetkan atau dipindahkan ke PDP (Pekerjaan Dalam Pelaksanaan) pada setiap periode.

2. Pemindahan Beban Material Menjadi PDP (Pekerjaan Dalam Pelaksanaan).

Setiap material yang telah dibukukan menjadi beban material akan dipindahbukukan menjadi Aset tetap Pekerjaan Dalam Pelaksanaan (PDP) setiap periode apabila masa pekerjaan melebihi satu bulan periode. dengan jurnal sebagai berikut

Pekerjaan Dalam Pelaksanaan Rp XXX

Beban Material Rp XXX

3. Pencatatan Jasa Pembangunan aset tetap

Pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan maka tagihan jasa pembangunan dapat ditagihkan oleh pihak ketiga ke PT PLN (Persero) wilayah Sumatera Utara Area Medan administrasi dan keuangan dengan melengkapi berkas tagihan.

Berkas tagihan ini berisikan Beberapa dokumen sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang telah disepakati bersama. User/ bagian terkait akan melaporkan progres pekerjaan setiap minggunya dengan Berita Acara Laporan Kemajuan Kerja (BA LKK), Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dilengkapi daftar pertanggungjawaban pemakaian material distribusi yang telah diambil dari gudang.

Sub bagian keuangan akan melakukan pencatatan atas jasa pembangunan aset tersebut dengan jurnal sebagai berikut ini:

Beban Jasa borong distribusi Rp XXX

Hutang Usaha Rp XXX

Beban jasa borong distribusi yang dibukukan pada saat dinaikan tagihan jasa pembangunan aset tetap menggunakan kode WBS (*Work Busines Sistem*) sebagai pembeda dengan beban Jasa Borong distribusi lainnya dimana WBS ini merupakan kode anggaran untuk isnvestasi yang dapat di asetkan atau dipindahkan ke PDP (Pekerjaan Dalam Pelaksanaan) pada setiap periode. WBS yang digunakan setiap Surat Perjanjian Kerja (SPK) selalu berbeda sesuai nomor surat anggaran yang diperuntukkan.

4. Pengakuan Aset tetap

Pengakuan aset tetap yang dibangun sendiri maupun aset yang langsung bisa dipakai, di PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan dikarenakan untuk menghemat biaya, memanfaatkan fasilitas yang tidak terpakai dan keinginan untuk mendapatkan mutu yang lebih baik. Pengakuan Aset tetap dari Pekerjaan Dalam Pelaksanaan ini dilakukan setelah adanya Berita Acara Pekerjaan Selesai (BAPS) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP).

Nilai aset tetap yang diakui adalah nilai Pekerjaan Dalam Pelaksanaan material dengan Pekerjaan Dalam Pelaksanaan jasa borong distribusi yang di buat dalam satu nomor master data aset tetap

Dengan jurnal sebagai berikut ini:

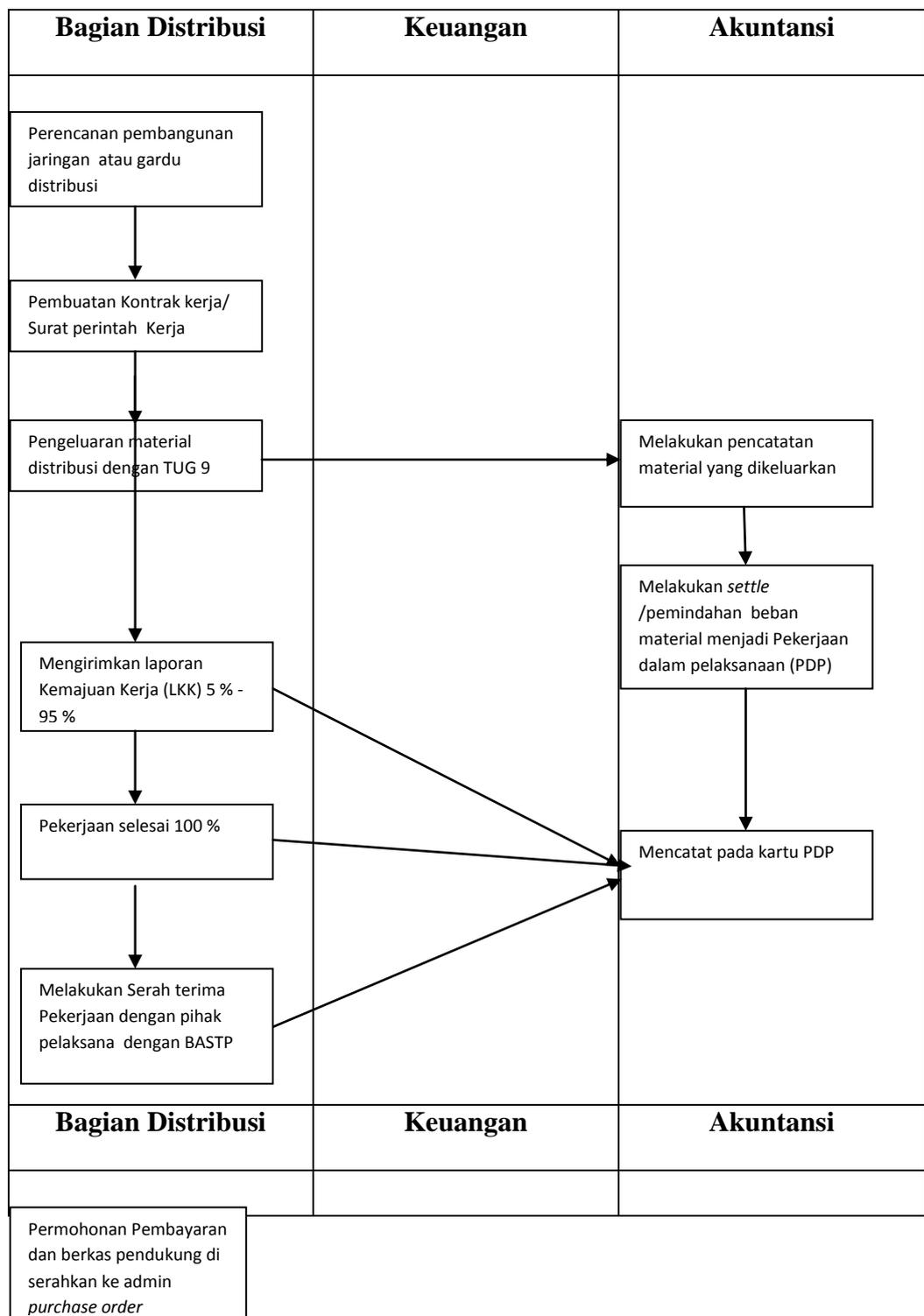
Aset Tetap	xxx	
	Pekerjaan Dalam Pelaksanaan	xxx

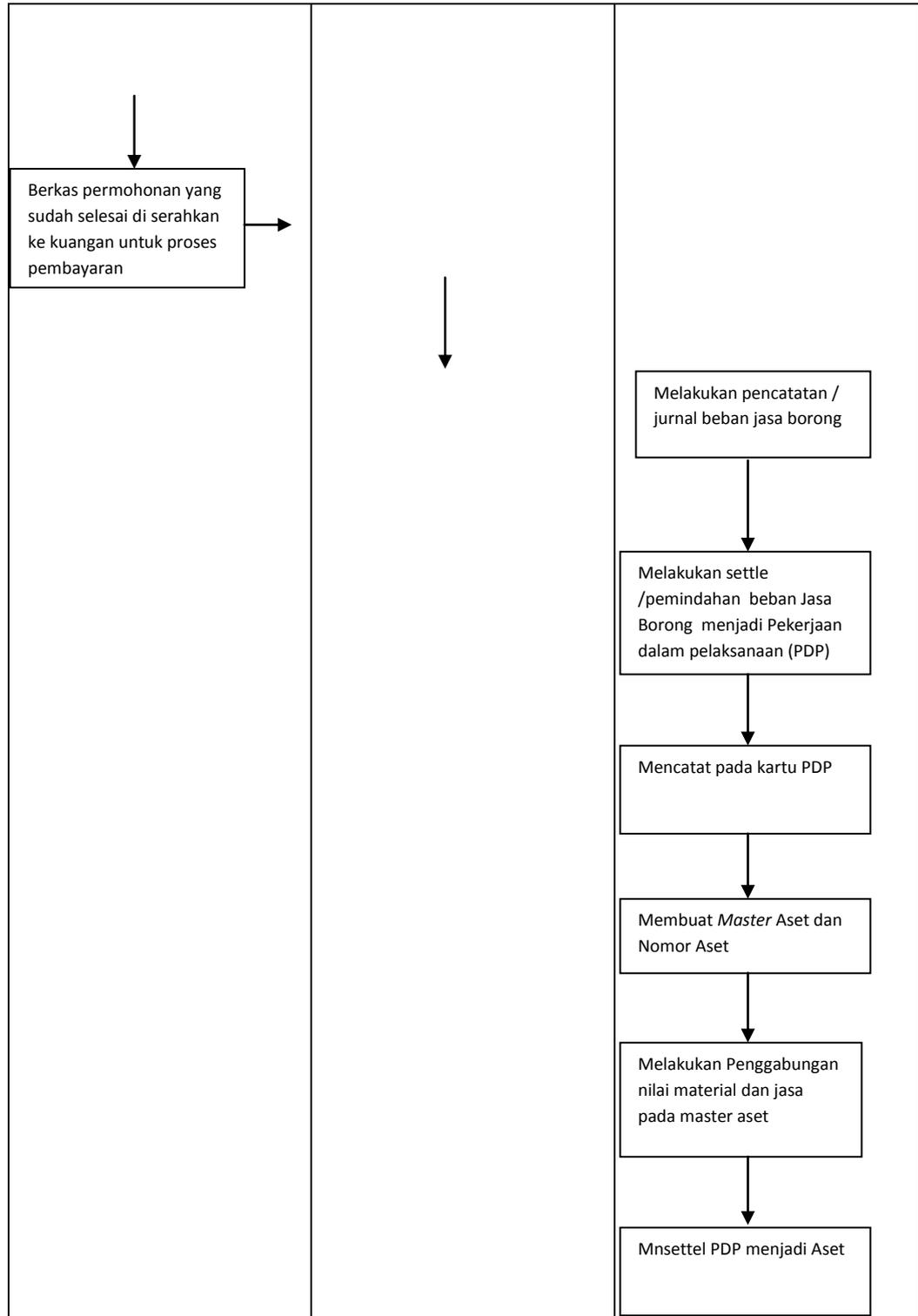
Akibat keterlambatan pelaporan pekerjaan selesai oleh bagian terkait (bagian distribusi selaku user anggaran) dan proses panagihan yang disertai dengan kelengkapan dokumen – dokumen administrasi penagihan setiap kontrak kerja yang telah selesai dikerjakan dan sudah diserahkan / dioperasikan ke bagian administrasi umum sub bagian akuntansi keuangan membuat sub bagian Akuntansi tidak bisa menambah aset atau mengakui aset baru yang telah siap dibangun dalam satu periode pembukuan yang sama dengan waktu pemanfaatan aset distribusi tersebut. Aset yang telah siap dikerjakan akan langsung digunakan dilapangan sehingga umur manfaat aset tetap yang sebenarnya dilapangan tidak sesuai dengan pembukuan, apabila

dokumen penyelesaian kontrak tidak segera diserahkan ke sub bagian Akuntansi.

Adapun alur/ proses pengakuan aset dari pembangunan sendiri adalah sebagai berikut.

Gambar 4.2 Alur proses pengakuan aset tetap dari pembangunan sendiri





Sumber : PT PLN. (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan

b. Pengukuran Aset Tetap

Menurut PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Medan, penilaian aset tetap adalah suatu benda berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Biaya perolehan aset tetap adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan pada tanggal pengakuan. jika pembayaran ditangguhkan melampaui jangka waktu kredit normal, perbedaan antara harga tunai dengan total pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit, kecuali beban bunga tersebut dikapitalisasi sesuai dengan kebijakan akuntansi biaya pinjaman.

Tujuan penilaian aset tetap adalah untuk menetapkan jumlah yang akan datang dibebankan sebagai biaya. Bila aset tetap didasarkan pada nilai tukar keluaran akan menyesatkan para pemakai laporan keuangan.

Menurut PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Medan, penilaian aset tetap hanya dapat didasarkan pada nilai tukar masukan saja, yang terdiri dari:

1. Historical Cost

Nilai tukar yang digunakan adalah nilai pasar pada saat perolehan.

Historical Cost terdiri dari:

- a. *Historical Cost To The Firm* adalah seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh dan menggunakan aset dalam keadaan yang diinginkan.
- b. *Prudent Cost* adalah pengeluaran yang ditetapkan oleh manajemen yang kompeten untuk memperoleh aset.

- c. *Orginal Cost* adalah *cost* yang pertama kali dikeluarkan oleh perusahaan yang mula-mula menggunakan *assets*. Sedangkan nilai dari aset yang *second hand* adalah nilai menurut *cost* yang digunakan oleh perusahaan yang pertama kali membeli.

2. *Current Input Value*

Nilai tukar yang didasarkan pada nilai pasar apabila aset tetap tersebut diperoleh sekarang. *Current input value* terdiri dari:

- a. *Current Replacement Cost* adalah jumlah untuk memperoleh aset yang sama melalui pembelian di pasar yang berlaku.
- b. *Appraisal Value* adalah suatu metode yang memperkirakan *current cost* atau *current value* dengan cara yang sistematis. Penelitian dengan *appraisal value* ini dinilai dengan cukup objektif karena yang mengadakan adalah perusahaan lain independen.
- c. *Fair Value*, di sini *cost* adalah jumlah yang diperlukan untuk

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap pada PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Medan adalah proses untuk mengalokasikan harga perolehan dari aset tetap menjadi beban pada satu periode. Proses ini digunakan untuk memadukan beban dengan pendapatan yang dihasilkan selama jangka waktu pemakaian aset tetap. Tujuan utama akuntansi penyusutan adalah untuk menentukan keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Pengertian depresiasi menurut PSAK No. 17 (2007:17.1) adalah alokasi suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat diestimasi. Sedangkan pengertian aset menurut PT. PLN adalah alokasi harga perolehan aset secara sistematis dan rasional selama masa manfaat ekonomi.

Metode penyusutan yang digunakan PT. PLN Pusat adalah metode garis lurus sejak aset tetap beroperasi secara bulanan, sehingga metode yang digunakan PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Medan adalah metode garis lurus, dengan nilai residu nol ditentukan pada saat perolehan. Sedangkan kebijakan penetapan masa manfaat aset tetap berwujud PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Medan sepenuhnya berada pada PT. PLN Pusat sehingga PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Medan tidak mempunyai wewenang dalam memutuskan umur dari suatu aset tetap berwujud. Apabila masa manfaat aset tetap berubah maka metode penyusutan yang digunakan tetap sama.

Perhitungan yang dilakukan PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Medan dilakukan setiap akhir bulan. Penyusutan yang dicatat dalam jurnal penyusutan dan daftar akuntansi penyusutan yang ada dalam program DTE yang dibuat PT. PLN Pusat, sehingga pencatatan penyusutan aset tetap berwujud PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Medan dilakukan secara komputerisasi. Adapun umur ekonomis dan tarif penyusutan aset tetap pada PT. PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Daftar persentase dan umur ekonomis Aset Tetap PT PLN
(Persero) Area Medan**

Aset Tetap			
Kode	Jenis	Umur Ekonomis	Presentase
01	Tanah	15	37,5%
02	Bangunan & kelengkapan lahan	47	97,5%
03	Bangunan saluran air	24	60%
04	Jalan sepur samping	27	67,5%
05	Instalasi dan mesin	27	67,5%
06	Reaktor nuklir	37	92,5%
07	Perlengkapan penyaluran T. listrik	37	92,5%
08	Gardu induk	37	92,5%
09	Saluran udara tegangan tinggi	37	92,5%
11	Kabel bawah tanah	37	92,5%
12	Jaringan distribusi	37	92,5%

13	Gardu distribusi	37	92,5%
14	Perlengkapan lain-lain distribusi	37	92,5%
15	Perlengkapan transmisi data	10	25%
16	Perlengkapan telekomunikasi	10	25%
17	Perlengkapan umum	10	25%
18	Perlengkapan pengolah data	5	12,5%
19	Kendaraan bermotor	5	12,5%
21	Material cadangan	-	-

Sumber : PT PLN. (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan

d. Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap bisa dilepaskan atau dihentikan penggunaannya dengan cara dijual, ditukarkan ataupun dibuang. Pada waktu aset tetap dilepaskan dari pemakaian maka semua akun yang berhubungan dengan aset tersebut dihapuskan. Apabila aset tersebut dijual maka selisih harga jual dengan nilai buku dicatat sebagai keuntungan atau kerugian. Pelepasan aset tetap pada PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Medan sangat mungkin terjadi yang disebabkan oleh tiga faktor yaitu:

1. Pelepasan Karena Sudah Rusak Parah

Apabila sebuah aset tetap perusahaan dilepaskan oleh karena rusak parah atau kemalingan atau karena sebab lainnya, maka perusahaan harus mengeluarkan dari buku perusahaan dengan sebuah kerugian. Cara yang digunakan untuk melepaskan aset tetap adalah dengan memperhitungkan sebagai berikut:

Harga Perolehan	xxx
Akumulasi Penyusutan	<u>xxx</u>
Nilai Buku	xxx

Dengan perhitungan diatas, maka Harga Perolehan yang semula didebet harus dikreditkan. Akumulasi Penyusutan yang semula kredit harus didebetkan. Sedangkan nilai buku harus didebet dan dianggap sebagai kerugian pelepasan. Dengan penjurnalan diatas, secara otomatis aset tetap akan terhapus dari buku perusahaan. Secara jurnal dapat dilihat sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan	xxx
Kerugian Pelepasan	xxx
Aset Tetap	xxx

2. Pelepasan karena dijual

Apabila aset tetap dilepaskan karena dijual, penjualan aset tetap perusahaan dapat terjadi dikarenakan:

1. Secara teknis dan atau ekonomis dari aset tetap yang sudah tidak menguntungkan perusahaan apabila tetap dipertahankan dan terdapat alternative atau pengganti lain yang lebih menguntungkan.
2. Peruntukan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan Rencana Umum Tata Ruang/ Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota (RUTR/RUTRWK) Yang disahkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
3. Merupakan satu-satunya alternative sumber dana bagi perusahaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak.

Akibat dari penjualan aset akan ada untung atau rugi dari penjualan yang harus diperhitungkan dan dicatat. Apabila perusahaan melakukan penjualan terhadap aset pasti telah mempertimbangkan untuk mendapatkan keuntungan. Pendapatan dari penjualan aset harus diakui bila seluruh kondisi perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli dan jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. Secara jurnal dapat dilihat sebagai berikut:

Kas	xxx
Akumulasi Penyusutan	xxx
Rugi Penjualan	xxx
Aset Tetap	xxx

3. Pelepasan Karena Tukar Tambah

Pelepasan aset tetap selain kedua sebab diatas, juga sering disebabkan oleh tukar tambah (trade-in). Dalam tukar tambah pada intinya hampir sama kasusnya dengan karena dijual. Ini artinya dalam tukar tambah ada untung atau rugi dari tukar tambah tersebut. Secara jurnal dapat dilihat sebagai berikut:

Aset Baru	xxx
Akumulasi Penyusutan	xxx
Aset Lama	xxx
Laba Penjualan	xxx
Kas	xxx

e. Penyajian Aset Tetap Di Neraca

Penyajian aset tetap di neraca PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Medan dinyatakan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Nilai yang berkaitan dengan aset tetap yang ada berdasarkan hasil dari laporan dan pengawasan aset tetap, sehingga dapat diketahui harga perolehan, akumulasi penyusutan maupun kondisi dari aset tersebut apakah masih layak digunakan atau tidak.

Berikut adalah laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2017 pada PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Medan :

Tabel 4.3 Neraca PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan

K E T E R A N G A N	S A L D O
A S E T	
ASET TETAP (NETTO)	1,811,684,662,134
Aset Tetap (Bruto)	1,924,887,511,431
Akumulasi Penyusutan	(113,202,849,297)
PEKERJAAN DALAM PELAKSANAAN (PDP)	51,862,949,896
PROPERTI INVESTASI	3,080,000,000
INVESTASI JANGKA PANJANG	-
ASET TIDAK LANCAR LAIN	2,005,095,694
Aset Tidak Beroperasi	-
Piutang Lain-lain (Jangka panjang)	1,718,545,694
Biaya yang Ditangguhkan	-
Biaya yang Dibayar dimuka & Uang Muka	286,550,000
DANA PELUNASAN OBLIGASI	-
ASET PAJAK TANGGUHAN	-
REKENING YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA	-
ASET LANCAR	484,741,543,170
Kas dan Setara Kas	-
Investasi Sementara	-
Piutang Usaha (Netto)	414,158,854,628
P e r s e d i a a n (Netto)	70,092,904,907
Uang Muka Pajak	173,639,000
Piutang Lain-Lain (Jangka Pendek)	316,144,635
Biaya Yang Dibayar Dimuka & Uang Muka (Jk. Pendek)	-
Aset Tidak Lancar yang Tersedia untuk Dijual	-
T U M I A H A S E T	2 353 374 250 894

EKUITAS DAN LIABILITAS	
TOTAL EKUITAS	(1,276,951,050,687)
Ekuitas Entitas Induk	(1,276,951,050,687)
Modal Saham	-
Tambahannya Modal Disetor	-
Ekuitas Lainnya (Akum Pendapatan Komprehensif Lain)	-
Saldo Laba	(1,276,951,050,687)
Keuntungan Reval Aset	-
AKUN ANTAR SATUAN ADMINISTRASI	3,295,375,730,959
LIABILITAS JANGKA PANJANG	21,458,156,385
Pendapatan Ditangguhkan	21,458,156,385
Liabilitas Pajak Tangguhan	-
Pinjaman Jangka Panjang	-
Utang Lain-lain (Jk. Panjang)	-
Uang Jaminan Langganan	-
Utang Biaya Proyek	-
Liabilitas Manfaat Pekerja (Jangka Panjang)	-
LIABILITAS JANGKA PENDEK	313,491,414,237
Utang Usaha	35,907,111,145
Utang Dana Pensiun	-
Utang Pajak	6,353,031,593
Utang Lain-Lain	270,431,870,011
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	799,401,488
Liabilitas Jangka Panjang Jatuh Tempo	-
Liabilitas Manfaat Pekerja (Jangka Pendek)	-
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS	2,353,374,250,894

Sumber : PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan

f. Pengungkapan Aset Tetap

pengungkapan aset tetap di PT PLN (Persero) wilayah Sumatera Utara Area Medan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut ini:

1. Setiap kelompok Aset Tetap wajib diungkapkan secara terpisah berdasarkan kepemilikan aset yaitu aset pemilikan langsung dan atau aset sewa pembiayaan.
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.

3. Jumlah penyusutan untuk masing-masing periode penyajian dan alokasi beban penyusutan.
4. Rugi penurunan nilai dan jumlah yang dijurnal balik yang diakui dalam laba rugi dan ekuitas (jika ada).
5. Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan yang dimasukkan dalam laba rugi, apabila tidak diungkapkan secara terpisah pada laporan laba rugi komprehensif.
6. Dalam hal aset tetap disajikan pada jumlah revaluasian, beberapa hal yang wajib diungkapkan yaitu:
 - a. Tanggal efektif revaluasi (tanggal penilaian)
 - b. Tanggal efektif persetujuan dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) apabila aset tetap untuk perhitungan pajak menggunakan jumlah revaluasian.
 - c. Nama penilai dan pelaporan penilaian terakhir.
 - d. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset.
 - e. Jumlah tercatat untuk setiap aset tetap seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya
 - f. Surplus revaluasi atau rugi penurunan nilai, yang menunjukkan perubahan selama periode.

3. Pembahasan

a. Pengakuan, pengungkapan, penyajian dan pengungkapan aset tetap

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada PT. PLN (Persero) Sumatera Utara mengenai pengungkapan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan

aset tetap yang diterapkan oleh di PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Nias berdasarkan PSAK. Nomor. 16 tahun 2015 dengan hasil sebagai berikut:

a. Pengakuan Aset tetap

Pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara area Medan pengakuan Aset tetap menggunakan dasar *acrual basic* dan dari hasil diatas dapat diketahui bahwa pengakuan aset tetap PT (Persero)Wilayah Sumatera Utara Area Medan sudah sesuai dengan PSAK No. 16 Tahun 2015

b. Pengukuran

Berdasarkan penelitian diatas pengukuran aset tetap yang dilakukan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan sudah sesuai dengan PSAK NO. 16 dan untuk metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan nilai *residu nol*

c. Penyajian Aset Tetap

Penyajian Aset Tetap di neraca PT PLN (Persero) Sumatera Utara Area Medan dinyatakan sebesar Nilai Buku yaitu harga perolehan aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penyajian aset tetap sudah sesuai dengan PSAK NO. 16 tahun 2015

d. Pengungkapan Aset Tetap

Kebijakan akuntansi aset tetap pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan dalam hal pengungkapan Aset tetap yang telah sesuai dengan yang dinyatakan dalam PSAK NO. 16 Tahun 2015

Berdasarkan Penelitian yang penulis lakukan pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan, mengenai penerapan aset tetap dan kebijakan akuntansi pada perusahaan dapat disimpulkan sudah sesuai dengan PSAK No. 16 Tahun 2015.

b. Kesesuaian Akuntansi Aset Tetap

Kesesuaian aset tetap menurut PSAK No. 16 pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan berpedoman pada standard akuntansi keuangan. Namun dalam penerapannya masih perlu disesuaikan terutama dalam metode penyusutan, metode penyusutan yang diterapkan perusahaan mempunyai pengaruh terhadap laba kotor yang diperoleh perusahaan selama umur ekonomis dari aset tetap tersebut. Oleh sebab itu, perusahaan diharapkan yang sifatnya relative konstan terutama terhadap aset tetap seperti gardu distribusi. Perusahaan menerapkan metode penyusutan ganda dikarenakan gardu yang rusak tidak bisa diperbaiki dan harus di ATTB kan apabila sudah rusak.

Berdasarkan pembahasan dan perbandingan diatas, maka hasil evaluasi penerapan PSAK 16 dan kebijakan akuntansi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Evaluasi Penerapan PSAK No. 16 dan kebijakan akuntansi pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan

Unsur	Keterangan	
	Sesuai	Tidak Sesuai
Pengakuan aset tetap	✓	
Pengukuran aset tetap	✓	
Penyajian aset tetap	✓	
Pengungkapan aset tetap	✓	

Sumber : Data Diolah penulis

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan akuntansi aset tetap pada PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Medan berdasarkan PSAK Nomor 16, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap di PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan telah sesuai dengan standard akuntansi yang berlaku dalam hal ini PSAK No. 16 tahun 2015.
2. Keterlambatan pencatatan aset tetap yang diakibatkan oleh terlambatnya kelengkapan document yang diperlukan oleh bagian akuntansi membuat keterlambatan pengakuan aset tetap.
3. Kebijakan akuntansi Aset tetap pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan berpedoman pada PSAK no. 16 Tahun 2015, Namun dalam hal penerapan Masih perlu disesuaikan terutama dalam hal menentukan Metode penyusutan, dengan kata lain, metode penyusutan yang diterapkan perusahaan mempunyai pengaruh terhadap laba kotor yang diperoleh perusahaan selama umur ekonomis dari aset tetap tersebut.

B. Saran

Berdasarkan uraian penulis di atas mengenai penerapan akuntansi aset tetap menurut PSAK No. 16 pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan, maka penulis memberikan saran :

1. Sebaiknya PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan melakukan *accrual* biaya jasa pembangunan untuk mempercepat pengakuan aset tetap yang dibangun sendiri.
2. Sebaiknya PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan memisah bagian aset tetap dari bagian akuntansi, serta metode penyusutan garis lurus yang diterapkan sudah tepat tetapi perlu diperhatikan agar tidak ada perubahan tingkat efisiensi operasi dan pemeliharaan yang relatif konstan setiap bulannya. Namun dengan pertimbangan yang kerap terjadi pada gardu distribusi diakui sebagai aset apabila di terpasang di jaringan dan gardu distribusi yang rusak tidak bisa diperbaiki dan harus di ATTB kan apabila sudah rusak. Penulis menyarankan agar perusahaan menerapkan metode saldo menurun ganda pada aset tetap yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliah, N. (2020). *The Role Of E-Filing In Improving Taxpayer Compliance In Indonesia. Accounting and Business Journal*, 2(1), 1-9.
- Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 19-23.
- Barus, M. D. B., & Hakim, A. (2020). Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika melalui Metode *Practice Rehearsal Pairs* pada Siswa SMA Al-Hidayah Medan. *Biormatika: Jurnal ilmiah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan*, 6(1), 74-78.
- Chrisna, H. (2018). Analisis Manajemen Persediaan Dalam Memaksimalkan Pengendalian Internal Persediaan Pada Pabrik Sepatu Ferradini Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 82-92.
- Chrisna, H., Karin, A., & Hasibuan, H. A. (2020). Analisis Sistem Dan Prosedur Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan Murabahah Pada PT. BANK BRI Syariah Cabang Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 156-166.
- Ernawati. 2014. *Analisis Penerapan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK No. 16) Atas Aset Tetap Pada PT. Pelayaran Liba Marindo Tanjung Pinang* Universitas Maritim Raja Ali Tanjung Pinang.
- Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berdasarkan PSAK No. 16 Pada RSUP Prof . DR.R.D. Kandou Manado*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado. <https://ejournal,Unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5435/4942>. Diakses Mei,30,2017
- Fadly, Y. (2011). *An Analysis Of Main Character Conflicts In M.J. Hyland's Carry Me Down*.
- Hernawaty, H., Chrisna, H., & Noviani, N. (2020). Transaksi Valas Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 1-17.
- Herydan W. Lekok. 2015 *Akuntansi Keuangan Menengah 2*. Cetakan Ke-3 Jakarta; Bumi aksara

- Ikatan Akuntansi Indonesia . 2015 *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Per efektif 1 Januari 2015*
- Kieso, D.E. dkk.2017 *Akuntansi Intermediate*. Edisi 12. Jilid 2. Jakarta: Erlangga
- Malikhah, I. (2019). Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi. *JUMANT*, 11(1), 67-80.
- Martani,D. dkk. 2014 *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Buku 1, Jakarta : Salemba empat
- Nasution, A. P. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Munte Kabupaten Karo.
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi *E-Budgeting* Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 669-693.
- Nasution, N. A., & Sari, W. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) Dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 76-83.
- Nazir,M. 2009. *Metode Penelitian*. Bandung : Ghalia Indonesia
- Pahlepi,R. 2011. *Penerapan akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No. 16 pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewah Yogyakarta*. Tugas Akhir ; Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Semarang. https://lib.unnes.ac.id/11286/1/9063_TA.pdf. Diakses November, 28,2016.
- PT PLN (Persero). 2014. *Kebijakan Akuntansi*. Jakarta
- Pulungan, A.H. dkk. 2013. *Akuntansi Keuangan Dasar Berbasis PSAK PerJuni 2012*. Buku 1. Jakarta: MitraWacana Media.
- Pura, R. 2013. *Pengantar akuntansi 1 Pendekatan Siklus Akuntansi*. Jakarta: Erlangga
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 54-68.

- Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 110-120.
- Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index. Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.
- Sari, M. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Saat Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia.
- Siregar, O. K. (2019). Pengaruh Deviden *Yield* Dan *Price Earning Ratio* Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 Sub Sektor Industri Otomotif. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 60-77.
- Soemarso, S.R. 2008. *Pengantar Akuntansi*, Edisi keempat. Rineka Cipta: Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif ,Kualitatif, dan R&D)* Bandung: Alfabeta, cv.
- Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 115-130.
- Suwardjono, 2014, *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, Edisi Ketiga, BPFE, Yogyakarta.
- Yunus, R. N. (2019). Kemampuan Menulis Argumentasi Dalam Latar Belakang Skripsi Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi. *Jumant*, 11(1), 207-216.